



Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

# LKIP 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



## Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Bidang, Sekretariat dan UPT di BKD Provinsi DKI Jakarta. Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BKD Provinsi DKI Jakarta pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, 31 Januari 2023  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



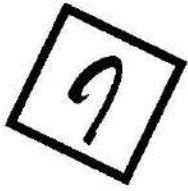
Maria Qibtya  
NIP 1965071985032002

# Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan	1
C. Isu Strategis Organisasi	14
<b>II. Perencanaan Kinerja</b>	<b>16</b>
A. Rencana Strategis 2017 - 2022	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	20
D. Indikator Kinerja Program Tahun 2022	23
E. Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022	23
F. Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan sasaran Operasional Tahun 2022	24
<b>III. Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>26</b>
A. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	26
B. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	51
C. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program	60
D. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah	76
E. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional	78
F. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	79
<b>IV. Penutup</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi dan Saran	89

## Lampiran

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
3. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
4. Daftar Rekapitulasi Capaian Indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022
5. Daftar Rekapitulasi Capaian Kegiatan Strategis Daerah (KSD) BKD Tahun 2022
6. Dokumen Penghargaan dan Prestasi BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022



## khtisar Eksekutif

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang telah disepakati antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdapat 26 (dua puluh enam) indikator kinerja pada level sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022;

Rata-rata capaian 26 (dua puluh enam) indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 100.14%. Namun, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang sampai dengan laporan ini disusun data capaian/realisasinya belum dapat di publikasikan karena masih dalam tahap penghitungan dan verifikasi serta validasi oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk indikator “Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN”. Adapun terhadap 1 (satu) kinerja dimaksud, dikecualikan dari perhitungan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Berikut ini adalah rincian hasil evaluasi 26 (dua puluh enam) indikator perjanjian kinerja (Perkin) Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis					
1.	Meningkatnya profesionalitas pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	54	N/A	N/A
2.	Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	326	335,5	102,91 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91.12%	100,13 %
4.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Jakarta Public Policy Center (JPPC) Nomor (64)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemrov. DKI Jakarta Nomor (68)	100%	98.75%	98.75 %
5.	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	100%	100%	100%
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	100%	100%	100%
<b>Sasaran Khusus</b>					
9.	Terwujudnya pengelolaan assessment center yang berbasis web	Persentase penyelesaian pengembangan sistem Computer Assisted Test (CAT) berbasis web	100%	100%	100%
10.	Terinternalisasinya nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku	Persentase tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku	80%	89%	111.25 %
11.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	(3) WTP	100%
12.	Meningkatkannya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
13.	Terimplementasinya rencana	Persentase implementasi	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.			
14.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	A (91)	AA (96,26)	105.78 %
15.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	98.11	103.27 %
16.	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	100%	100%
17.	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%	100%
<b>Sasaran Operasional</b>					
18.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
19.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
20.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>100.14 %</b>

Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun sebelumnya sebesar 95.9%, maka pada tahun 2022 terdapat trend kenaikan capaian tujuan dan sasaran strategis sebesar 4.24 % menjadi 100.14%. Peningkatan trend capaian tersebut juga seiring dari keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2

(dua) program prioritas dan 88 (delapan puluh delapan) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 610.322.157.445,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.605.936.986.747,- atau setara 99,28%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Program	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	A.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 13.404.158.324	Rp. 12.632.301.235	94.24
2.	B.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 503.204.000	Rp. 451.400.000	89.71
3.	A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 594.860.777.231	Rp. 591.332.537.824	99.41
4.	B.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.554.017.890	Rp. 1.520.747.688	97.86
<b>Total</b>			<b>Rp. 610.322.157.445</b>	<b>Rp. 605.936.986.747</b>	<b>99.28</b>

Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja yang ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah sebesar 4,65%.



# BAB. I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

## B. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain : **aspek organisasi, sumber daya manusia serta pendanaan.**



## Aspek Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi - fungsi yang harus dijalankan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai;
- d. penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
- e. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai;
- f. pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
- g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- h. pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- i. pengembangan karir pegawai;
- j. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional dan petensi Pegawai;
- k. pelaksanaan konseling pegawai;
- l. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- m. penyusunan standar kompetensi;
- n. pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
- o. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;
- p. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- q. pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen kepegawaian daerah;

- r. pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
- s. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- t. pembinaan pegawai KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BKD;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD;
- w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD; dan
- x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.

BKD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BKD. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Sekretariat secara garis besar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;
- d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD oleh unit kerja BKD;
- f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis BKD;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BKD;
- h. pengelolaan layanan kepegawaian BKD
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD;
- j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BKD;

- k. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BKD;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD;
- m. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas BKD;
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Subbagian Kepegawaian;
- 3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
- 4) Subbagian Keuangan.

Tiap Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

## 2. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pendayagunaan pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan pegawai;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan persetujuan teknis penyusunan dan penetapan formasi pegawai meliputi pegawai baru, pegawai tugas belajar dan ijin belajar;
- e. penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai;
- f. perencanaan penempatan pegawai;
- g. penyelesaian penetapan calon pegawai menjadi pegawai;

- h. perencanaan pelaksanaan sumpah/janji pegawai;
- i. penyusunan rencana pemindahan dan pendayagunaan pegawai;
- j. fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendayagunaan pegawai; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Perencanaan Pegawai;
- 2) Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai;
- 3) Subbidang Mutasi.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### 3. Bidang Pengembangan

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepangkatan;
- e. penyusunan dan perencanaan pengembangan karier pegawai;
- f. penganalisaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pejabat;
- g. penyusunan rencana pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan proses kenaikan pangkat berdasarkan ujian penyesuaian ijazah;
- i. pelaksanaan ujian dinas untuk kenaikan pangkat;

- j. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian, dan administrasi kenaikan jabatan pejabat fungsional;
- k. pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam Jabatan Struktural;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Pengembangan Karier;
- 2) Subbidang Kepangkatan;
- 3) Subbidang Jabatan Fungsional.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 4. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- e. penyusunan regulasi peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. penyusunan dan pelaporan hasil kajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- g. penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;
- h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan kesejahteraan pegawai;
- i. pelaksanaan proses pemberian cuti pegawai;
- j. pengkajian dan pemrosesan pemberian penghargaan dan tanda jasa;

- k. penyelesaian proses penetapan pensiun pegawai;
- l. pengurusan hak-hak kesejahteraan pegawai; dan
- m. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
- 2) Subbidang Penghargaan;
- 3) Subbidang Pensiun dan Cuti.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 5. Bidang Pengendalian Kepegawaian

Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Pegawai;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian Pegawai;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian Pegawai;
- d. penghimpunan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- f. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan hukum pegawai kepada pimpinan dan/atau kepada kepala SKPD/UKPD;
- h. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- i. pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai termasuk penjatuhan hukuman disiplin pegawai pada SKPD/UKPD;

- j. pelaksanaan upaya peningkatan disiplin pegawai;
- k. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis proses penjatuhan disiplin pegawai pada SKPD/UKPD;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) disiplin dan prestasi kerja pegawai;
- m. pengkoordinasian proses pelaksanaan penandatanganan penetapan dokumen kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) pimpinan SKPD dan Biro Sekretariat Daerah;
- n. penyusunan standar pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;
- o. penyusunan rumusan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;
- p. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Kepegawaian.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kesejahteraan dan Pensiun didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbidang Peraturan Pegawai;
- 2) Subbidang Disiplin Pegawai;
- 3) Subbidang Kinerja Pegawai.

Tiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### 6. Suku Badan Kepegawaian Kota

Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Suku Badan Kepegawaian Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang sebagian kewenangannya telah dilimpahkan pada lingkup wilayah Kota Administrasi, dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan kepegawaian.

## 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas teknis pelayanan langsung pengelolaan kepegawaian atau melaksanakan fungsi dukungan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BKD. Adapun UPT yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD adalah :

- 1) UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (PPKP), berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai.
- 2) UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian (Pusdatin), berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 291 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kepegawaian.
- 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## 8. Kelompok Jabatan Fungsional

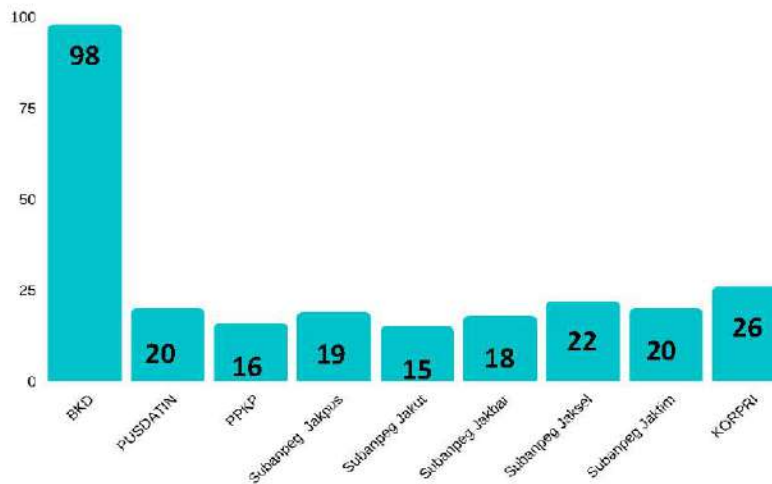
Selain satuan-satuan organisasi di atas, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi BKD sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja. Adapun pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi BKD Provinsi DKI Jakarta selengkapnya terdapat dalam daftar lampiran.



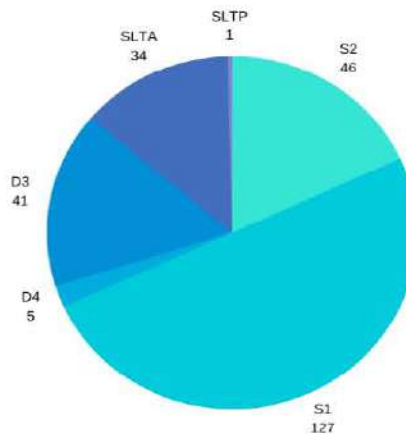
## Aspek Sumber Daya Manusia

BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 254 personil yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 64.231 pegawai pada kondisi Desember 2022.

**Gambar 1**  
**Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Lokasi Kerja**



**Gambar 2**  
**Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan**



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 127 pegawai (50%), diikuti oleh Sarjana Strata 2 sebanyak 46 pegawai (18,11%), pegawai berpendidikan Diploma III (D3) sebanyak 41 pegawai (16,14%), pegawai berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 34 pegawai (13,39%), pegawai berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 1 pegawai (0,39%) seperti diuraikan dalam gambar 2 di atas. Untuk keperluan penyusunan laporan ini, deskripsi di atas dibatasi hanya kepada penjelasan kualifikasi pendidikan berdasarkan kuantitas tanpa mengkaji kesesuaian antara kualitas pendidikan para pegawai dengan kebutuhan BKD Provinsi DKI Jakarta secara khusus maupun kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum.

**Gambar 3**  
**Rasio Jumlah Pegawai BKD dengan Pegawai yang Dilayani**  
**(kondisi Desember 2022)**



Dalam gambar 3 di atas terlihat rasio jumlah personil BKD Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilayani dan memperlihatkan beban kerja yang cukup besar. Untuk mengatasi beban kerja tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta telah mengaplikasikan teknologi informasi yang mutakhir dan tepat guna untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa aplikasi yang dikembangkan BKD Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2022 untuk mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain: eSKP, Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), Sistem Informasi Penghargaan dan Proses online Pengajuan Ujian Penyesuaian Ijazah/ Ujian Peningkatan Pendidikan/Ujian Dinas.



## ASPEK PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2022 BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp **14.308.768.421**,-. Adapun untuk alokasi anggaran masing - masing unit kerja BKD dapat dilihat pada **Tabel 1** dan **Gambar 4**. Sementara untuk realisasi anggaran belanja langsung BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp **13.452.248.677**,- atau sebesar 99,28 % seperti terlihat pada **Gambar 4**.

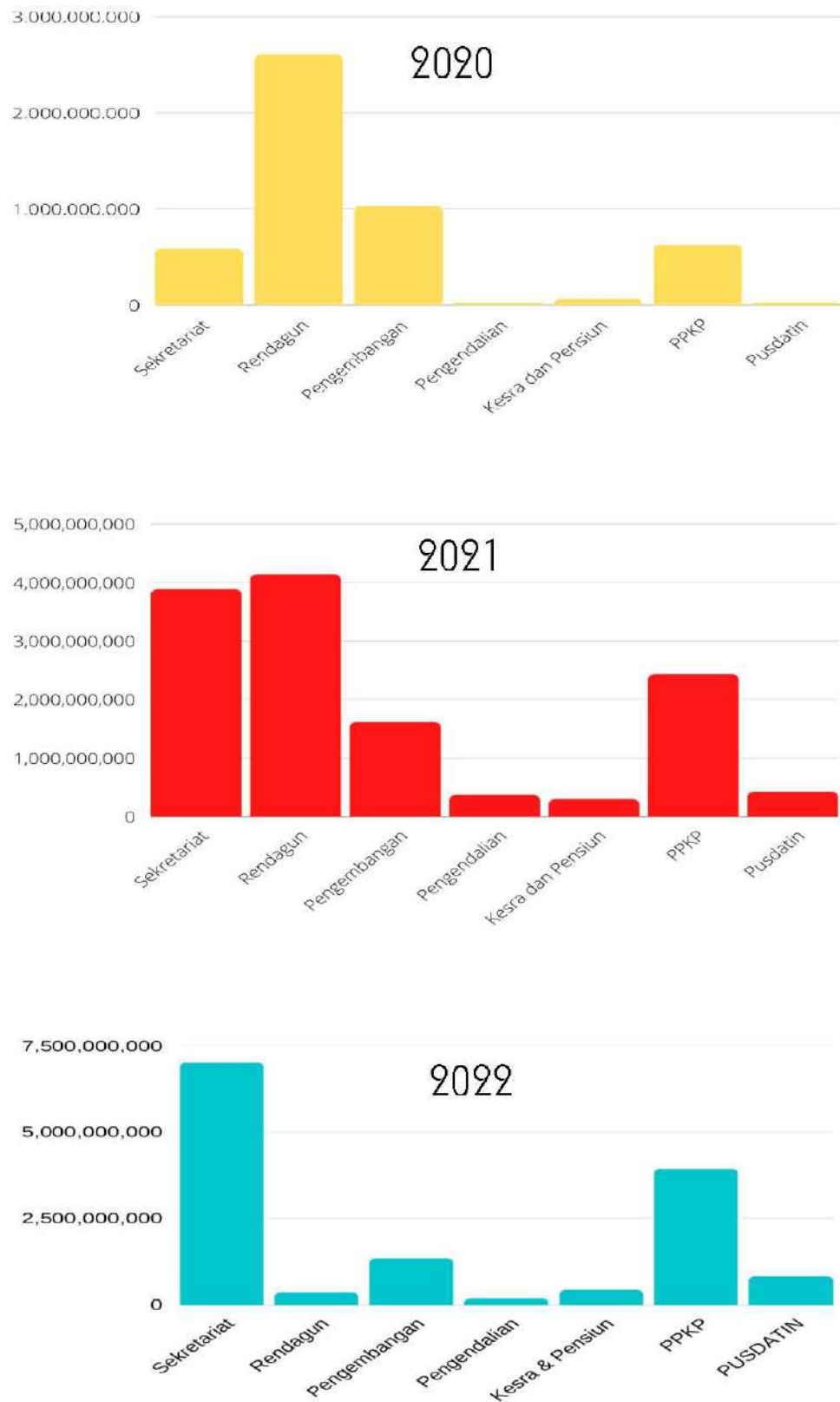
Tabel 1

### Alokasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2020-2022

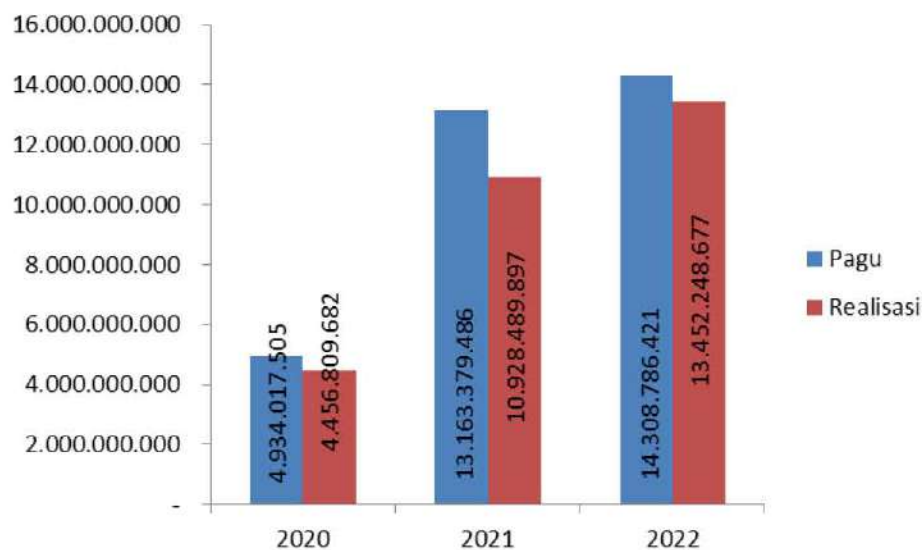
No	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)		
		2020	2021	2022
1.	Sekretariat	582,136,186	3.882.561.276	7.026.744.051
2.	Bidang Rendagun	2,605,253,889	4.136.668.960	338.501.714
3.	Bidang Pengembangan	1,027,222,890	1.615.185.000	1.330.020.000
4.	Bidang Pengendalian	14,021,040	373.145.400	468.600.000
5.	Bidang Kesra dan Pensiun	58,950,000	298.500.000	410.450.000
6.	UPT PPKP	626,882,500	2.431.646.600	3.930.871.240
7.	UPT Pusdatin	19,551,000	425.672.250	803.599.416
<b>Total Anggaran</b>		<b>11.842,777.823</b>	<b>13.163.379,486</b>	<b>14.308.786.421</b>

Catatan : Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa digabungkan dengan Sekretariat.

**Gambar 4**  
**Alokasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2020 – 2022**



**Gambar 5**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung BKD Tahun 2020 – 2022**



### C. Isu Strategis

Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta baik internal maupun eksternal, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka berikut ini merupakan isu-isu Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta :

#### 1. *Grand Design* Manajemen ASN.

Penyusunan *grand design* manajemen ASN dibuat untuk kurun waktu 5 tahunan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Gubernur terpilih. *Grand design* ini akan berisi roadmap/peta jalan dari setiap batasan waktu yang ditentukan sehingga dapat menjadi acuan program dan kegiatan bagi BKD Provinsi DKI Jakarta yang selaras antar sub bagian. *Grand design* manajemen ASN akan diklasifikasikan dalam 6 (enam) dimensi sesuai dengan fokus reformasi birokrasi manajemen ASN antara lain : (1) Dimensi perencanaan SDM Aparatur (2) Dimensi rekrutmen dan seleksi (3) Dimensi pengembangan kompetensi (4) Dimensi penilaian kinerja dan penghargaan (5) Dimensi promosi, rotasi dan karir (6) Dimensi purnabakti.

## 2. Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja.

Penerapan manajemen berbasis kinerja diawali dengan penyusunan indikator-indikator aktivitas kerja yang terukur pada setiap posisi/jabatan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Indikator-indikator ini dapat diklasifikasikan menjadi indikator kinerja Kepala SKPD, indikator kinerja Kepala Bagian/Bidang/UPT dan indikator kinerja individu jabatan pelaksana yang diturunkan (*cascading*) dari visi dan misi dan sasaran kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem informasi manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem *reward and punishment* yang jelas, sehingga akan terbentuk mekanisme kerja yang terukur dan sesuai dengan kontrak kinerja yang menjadi target pencapaian masing-masing SKPD.

## 3. Internalisasi Budaya Organisasi.

Budaya organisasi menjadi faktor pengungkit dalam menciptakan ASN Provinsi DKI yang professional, berintegritas, melayani, dan bebas korupsi. Proses internalisasi budaya organisasi memerlukan komitmen pimpinan yang kuat, serta agen perubah (*agent of change*) di setiap SKPD. Selain itu, kontinuitas program internalisasi budaya organisasi menjadi kunci utama keberhasilan program sehingga dukungan anggaran dan waktu yang panjang menjadi faktor yang krusial.

## 4. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) ASN BKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan kapasitas ASN BKD Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan berbagai kegiatan seperti magang (*Internship*) di lingkungan Kementerian atau Pemerintah Daerah lain yang telah memiliki role model unggul dibidang pengelolaan kepegawaian, *coaching and counseling* yang dilakukan atasan kepada bawahannya melalui mekanisme manajemen berbasis pengetahuan (*knowledge management*) serta keikutsertaan dalam program diklat yang berbasis sertifikasi, antara lain : (1) *Certified Manpower Planner* (2) *Certified Remuneration System* (3) *Certified Career & Talent Management Specialist Program* (4) *Certified Performance Management* (4) *Certified Human Resources Management Professional*.



## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

### A. Rencana Strategis 2017 - 2022

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi RPJMD

Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 di buat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**VISI**

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

**MISI**

**BAGI WARGA**

Jakarta akan menjadi kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

**BAGI BIROKRASI**

Jakarta akan menjadi wahana aparatur negara untuk berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

**BAGI BANGSA DAN NEGARA**

Jakarta akan menjadi ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinnekaan.

**BAGI PEREKONOMIAN**

Jakarta akan menjadi kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

**BAGI LINGKUNGAN**

Jakarta akan menjadi kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, BKD Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian **misi ketiga** yaitu **menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokrasi dan berintegritas**, dalam lingkup bidang kepegawaian misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN.

**2. Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Tujuan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022. Adapun tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam misi ketiga yang menjadi urusan dan kewenangan BKD Provinsi DKI

Jakarta yang adalah “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur**”, dengan indikator dan target sebagai berikut :

No	Indikator Tujuan	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	68	73	75	85	91

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu, sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran strategis RPJMD yang menjadi kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta “**meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur**”, dengan indikator dan target sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Target Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	89.95	89.96	75	78	90

### 3. Tujuan dan Sasaran Renstra

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

▪ **Tujuan :**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN ( Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	53.96	53.97	43.24	46.8	52

▪ **Sasaran :**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	N/A	N/A	N/A	290	326

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja pada level sasaran strategis antara Kepala BKD Provinsi Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta formulir Perjanjian Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas diilustrasikan dalam matriks berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya profesionalitas pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	54
2.	Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	326
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022 tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program dan 88 (delapan puluh delapan) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 343.946.369.875,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Program	Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	A.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	18	Rp. 13.404.158.324
2.	B.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	10	Rp. 503.204.000
3.	A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22	Rp. 594.860.777.231
4.	B.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38	Rp. 1.554.017.890
<b>Total</b>			<b>88</b>	<b>Rp. 343.946.369.875</b>

### C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (*outcome*).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :



**IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)**  
**Badan KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI Jakarta**  
 Tahun 2018 - 2022 sesuai Peraturan Kepala BKD Nomor 38 Tahun 2018



Rincian target pada indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam surat keputusan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	90
2.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	90

Adapun berdasarkan surat Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 4.547/-078 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penyampaian Usulan Revisi Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Tahun 2017-2022, BKD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan perubahan target pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN periode Tahun 2020 – 2022 menjadi sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target Awal	Usulan Revisi	Target Awal	Usulan Revisi	Target Awal	Usulan Revisi
Indeks Profesionalitas ASN	89.97	75	89.99	78	90	81

Usulan perubahan target dimaksud disebabkan karena data acuan yang digunakan dalam penetapan target Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018-2022 dalam RPJMD mengacu pada hasil perhitungan capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017 sebesar 89.9, dimana metode perhitungannya belum mengacu pada PermenPAN RB dan Perka BKN sehingga masih dilakukan secara manual menggunakan form excel/kertas kerja yang disampaikan oleh BKN dengan indikator/dimensi penilaian yang terdiri dari : Kompetensi, Kinerja, Kompensasi dan Disiplin tanpa disertai pembobotan di masing-masing indikator/dimensi.

Pada Tahun 2018 dengan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, indikator/dimensi dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengalami perubahan dengan menggunakan pembobotan. Adapun indikator/dimensi penilaiannya terdiri dari : Kualifikasi (bobot 25%), Kompetensi (bobot 40%), Kinerja (bobot 30%) dan Disiplin (bobot 5%). Atas dasar hal tersebut, serta mempertimbangkan adanya potensi penurunan dukungan APBD terhadap kegiatan-kegiatan BKD dan BPSDM yang memiliki kontribusi untuk meningkatkan nilai dimensi kompetensi dan kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka diusulkan penyesuaian target capaian di periode Tahun 2020 - 2022. Selanjutnya, berdasarkan hasil supervisi dan verifikasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta, maka disepakati perubahan target Indeks Profesionalitas ASN yang akan diakomodir dalam perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		Target Tahun 2022	
	Usulan Revisi	Hasil Supervisi/ Verifikasi	Usulan Revisi	Hasil Supervisi/ Verifikasi	Usulan Revisi	Hasil Supervisi/ Verifikasi
Indeks Profesionalitas ASN	75	75	78	78	81	90

#### D. Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut :

Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2022
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	85
	Indeks Capaian Kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	90
	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	13
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	93
	Indeks Kepuasan Layanan KORPRI	90

#### E. Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD), pada tahun 2022 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan strategis daerah (KSD) dengan target 37 (tiga puluh tujuh) rencana aksi sebagaimana dijabarkan dalam matriks dibawah ini :

No	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Jumlah Rencana Aksi	Target Periode			
			B.03	B.06	B.09	B.12
1	Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan – KSD 5	1	100%	100%	100%	100%
2.	Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif – KSD 12	1	100%	100%	100%	100%
3.	Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak – KSD 13	1	100%	100%	100%	100%
4.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA – KSD 39	9	100%	100%	100%	100%
5.	Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management – KSD 60	1	100%	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan – KSD 61	10	100%	100%	100%	100%
7.	Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN – KSD 62	5	100%	100%	N/A	100%
8.	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik ) Tahun 2022 – KSD 63	1	N/A	N/A	100%	N/A
9.	Jakarta Public Policy Center (JPPC) – KSD 64	1	N/A	N/A	100%	100%
10.	Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan – KSD 66	1	100%	100%	N/A	100%
11.	Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta – KSD 68	6	100%	100%	100%	100%
<b>Jumlah Rencana Aksi</b>		<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## F. Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Tahun 2022

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, pada tahun 2022 BKD Provinsi DKI

Jakarta melaksanakan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Khusus dan 3 Indikator Sasaran Operasional dengan target sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<b>Sasaran Khusus</b>			
1	Terwujudnya pengelolaan assessment center yang berbasis web	Persentase penyelesaian pengembangan sistem Computer Assisted Test (CAT) berbasis web	100%
2	Terinternalisasinya nilai-nilai Kode Etik dan Kode Prilaku	Persentase tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai Kode etik dan Kode Prilaku	80%
3	Tersujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini Laporan Keuangan	(3) WTP
4	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	AA (91)
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95
8	Peningkatan penggunaan e_office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%
9	Peningkatan penggunaan e-Produk Hukum	Jumlahperbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%
<b>Sasaran Operasional</b>			
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%



## BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel yang bersumber dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian Indikator	Kategori Capaian	Rentang Nilai Capaian	
		Minimal	Maksimal
101% – 110%	Sangat Baik	110	120
100%	Baik	109	
80% – 99%	Cukup	70	89
60% – 79%	Kurang	50	69
0% – 50%	Sangat Kurang	0	49

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja juga merupakan representasi dari keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target 4 (empat) yang diukur dalam 3 (tiga) indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022.

### A. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja sasaran strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Profesionalitas ASN pada Dimensi Kuaifikasi, Kinerja dan Disiplin				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	54	N/A	N/A

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin. Adapun dari 4 (empat) dimensi dimaksud yang menjadi kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah 3 (tiga) dimensi sebagai berikut :

a. Kualifikasi (bobot 25%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-1 (Diploma-Satu)/SLTA Sederajat;
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

b. Kinerja (bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja.

## c. Disiplin (bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat).

Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi capaian / realisasi Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) tahun 2022, BKD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan surat kepada Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta nomor e-0786/RB.02.07 tanggal 30 Desember 2022 perihal Laporan penghitungan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Tahun 2022 dengan tembusan Asisten Pemeintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta yang secara substansi menginformasikan timeline penghitungan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai berikut:

Waktu	Rincian Kegiatan
April – Desember 2022	Instansi melakukan pemutakhiran data riwayat kepegawaian terkait dimensi penilaian IP ASN pada SAPK
Desember 2022 - Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktorat Jabatan ASN melaksanakan rekonsiliasi data dari SAPK ke Aplikasi IP ASB secara berkala</li> <li>b. Instansi melakukan konfirmasi pengukuran IP ASN Tahun 2021 ke Aplikasi IP ASN dengan mengupload surat pernyataan</li> </ol>
Februari 2023	Direktorat Jabatan ASN melakukan penyusunan laporan dan publikasi nilai IP ASN

Merujuk pada timeline penghitungan diatas, maka sampai dengan laporan ini disusun data capaian / realisasi Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) belum dapat dipublikasikan karena masih dalam tahapan konfirmasi pengukuran, verifikasi dan validasi oleh

Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi IP ASN.

### Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Merit	Nilai	326	335,5	102,91%

Perhitungan indikator “Indeks Sistem Merit” mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan pada 8 (delapan) aspek dengan menggunakan pembobotan, sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	10%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir	30%
4	Promosi dan Mutasi	10%
5	Manajemen Kinerja	20%
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%
7	Perlindungan dan Pelayanan	4%
8	Sistem Informasi	6%

Indikator penilaian terhadap seluruh aspek diatas dijabarkan kedalam beberapa Sub Aspek penilaian yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut :

Skor	Kategori	Indikator
4	Sangat Baik	Apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan
3	Baik	Apabila semua elemen yang diukur cukup lengkap namun terdapat elemen memenuhi ketentuan
2	Kurang	Apabila semua elemen yang diukur kurang lengkap
1	Buruk	Apabila hampir semua elemen yang diukur belum tersedia

Penetapan tingkat penerapan sistem merit akan dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tingkatan sebagai berikut :

Kategori	Nilai	Indeks	Sebutan
IV	325 - 400	0.81 - 1	Sangat Baik
III	250 - 324	0.61 - 0.8	Baik
II	175 - 249	0.41 - 0.6	Kurang
I	100 - 174	0.2 - 0.4	Buruk

Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi capaian / realisasi Indeks Sistem Merit, berdasarkan Pemprov. DKI Jakarta menjadi salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang mendapatkan Anugerah Meritokrasi pada kategori IV (Sangat Baik) dengan total nilai 335,5 atas penilaian penerapan sistem merit yang dilakukan oleh KASN tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 26/KEP.KASN/C/VII/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Adapun dalam surat keputusan dimaksud, KASN juga memberikan 16 rekomendasi penyempurnaan pada 5 aspek penilaian yang harus ditindaklanjuti pada periode penilaian berikutnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Nilai Maksimal (sesuai Perka KASN)	Capaian Tahun 2022	Jumlah Rekomendasi Perbaikan
1.	Perencanaan Kebutuhan	40	40	-
2.	Pengadaan	40	40	-
3.	Pengembangan Karir	130	67,5	10
4.	Promosi dan Mutasi	40	37,5	1
5.	Manajemen Kinerja	80	75	1
6.	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	37.5	2
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	-
8.	Sistem Informasi	24	22	2
<b>Jumlah</b>		<b>410</b>	<b>335,5</b>	<b>16</b>

Dalam rangka mendukung pencapaian kedua indikator kinerja sasaran strategis diatas, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 17 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.13.083.701.235,- atau setara 94.08% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 13.907.362.324,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	98,21%
2		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	96,23%
3		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100%	99,52%
4		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100%	99,41%
5		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	99,03%
6		Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	94,57%
7		Pengelolaan Mutasi ASN	100%	99,28%
8		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	87,23%
9		Pengelolaan Promosi ASN	100%	64,33%
10		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100%	85,33%
11		Pengelolaan Assessment Center	100%	92,35%

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5
12		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100%	55,91%
13		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	95,38%
14		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	98,55%
15		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100%	100,00%
16		Pembinaan Disiplin ASN	100%	100,00%
17		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	100,00%
18		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100%	97,83%

Selain didukung oleh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja sasaran juga tidak terlepas dari pencapaian beberapa rencana aksi KSD sebagai berikut :

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ASISTEN PEMERINTAHAN</b>								
1	KSD 61	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan administrator	Terlaksananya revidi kamus kompetensi teknis jabatan administrator hasil revidi sesuai dengan OTK baru dan penyetaraan jabatan struktural	B09	100% kamus kompetensi teknis jabatan administrator yang telah direvidi sesuai dengan OTK baru dan penyetaraan jabatan struktural	100%
				Tersusunnya surat usulan penetapan kepada Kementerian PAN dan RB	Tersusunnya surat usulan penetapan kepada Kementerian PAN dan RB	B09	Surat usulan penetapan standar kompetensi teknis jabatan administrator kepada Kementerian PAN dan RB	100%
				Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang standar kompetensi teknis jabatan administrator	Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang standar kompetensi teknis jabatan administrator	B12	Rancangan Keputusan Gubernur tentang standar kompetensi teknis jabatan administrator	100%
			Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	B06	25 % kamus kompetensi teknis jabatan pengawas yang tersusun	100%
				Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	B09	50 % kamus kompetensi teknis jabatan pengawas yang tersusun	100%
				Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	B12	100 % kamus kompetensi teknis jabatan pengawas yang tersusun	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	B12	Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	100%
			Kebijakan Pola Pengembangan Karir PNS	Tersusunnya Keputusan Gubernur mengenai Pola Karir PNS	Pola karier dan peta jabatan	B09	Kepgub Kebijakan Pola Pengembangan Karier yang memuat antara lain: 1. Bentuk Pola Pengembangan Karier PNS 2. Peta Jalur Karier PNS	100%
			Penetapan Kebijakan Manajemen Talenta	Terlaksananya penetapan Kebijakan Manajemen Talenta	Ditetapkannya Pergub Manajemen Talenta	B06	Pergub Manajemen Talenta	100%
			Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta	Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta	Terimplementasinya Kebijakan Manajemen Talenta	B09	Laporan hasil implementasi Kebijakan Manajemen Talenta yang memuat antara lain : 1. Kondisi Eksisting Pemetaan PNS pada Talent Pool berdasarkan Kompetensi dan Kinerja 2. Updating Data Manajemen Talenta 3. Rencana Tindak Lanjut Manajemen Talenta	100%
			Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Badan Kepegawaian Daerah atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2022	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022. Target Capaian 90%	B06	Berita acara hasil verifikasi Inspektorat. Catatan: Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Ditindaklanjuti rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022. Target Capaian 95%	B12	Berita acara hasil verifikasi Inspektorat Catatan: Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%	100%
			Penyusunan TOR dan Roadmap pengembangan sistem Talent Pool	Tersedianya TOR dan Roadmap pengembangan sistem Talent Pool	Tersusunnya TOR dan Roadmap pengembangan sistem Talent Pool	B03	TOR dan Roadmap pengembangan sistem Talent Pool	100%
			Pelaksanaan Uji Coba Sistem Talent Pool	Terlaksananya Uji Coba Sistem Talent Pool	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba Sistem Talent Pool	B03	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba Sistem Talent Pool	100%
			Pengembangan Sistem Talent Pool	Terlaksananya Pengembangan Sistem Talent Pool	Pelaksanaan Pengembangan Sistem Talent Pool	B09	Hasil Pengembangan Sistem Talent Pool Target Bulan Juli	100%
8	KSD 68	Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Penyusunan Keputusan Gubernur tentang tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	B03	Keputusan Gubernur tentang tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	100%
			Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	B06	Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja (Target selesai Bulan April)	90%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Evaluasi Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	Terlaksananya Survey Hasil Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	Tersusunnya Laporan Hasil Survey Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	B03	Laporan Hasil Survey ke-1 Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja yang memuat antara lain:1. Cakupan Responden2. Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap Nilai-nilai Budaya Kerja3. Efektifitas Sosialisasi Pergub 54/2020	100%
				Terlaksananya Survey Hasil Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	Tersusunnya Laporan Hasil Survey Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	B09	Laporan Hasil Survey ke-2 Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja yang memuat antara lain: 1. Cakupan Responden 2. Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap Nilai-nilai Budaya Kerja 3. Efektifitas Sosialisasi Pergub 54/2020 4. Efektifitas Peran Agen Perubahan di Perangkat Daerah	100%
			Penetapan agen perubahan budaya kerja	Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang penetapan agen perubahan budaya kerja	Disampaikannya Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan agen perubahan budaya kerja kepada Gubernur	B09	Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan agen perubahan budaya kerja untuk 41 Perangkat Daerah dan 10 Biro Setda (Target selesai Bulan Agustus)	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pelaksanaan Program kerja agen perubahan	Terlaksananya Program kerja agen perubahan	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Program kerja agen perubahan	B06	Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kerja Agen Perubahan Semester I kepada Sekda melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, disertai dengan pemeringkatan	100%
						B12	Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kerja Agen Perubahan Semester II kepada Sekda melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, disertai dengan pemeringkatan	100%
			Pelaksanaan forum agen perubahan	Terciptanya knowledge sharing dalam sharing forum bagi agen perubahan	Terlaksananya sharing forum bagi agen perubahan	B12	Laporan pelaksanaan sharing forum agen perubahan yang memuat antara lain: 1. Progres implementasi nilai-nilai Budaya Kerja 2. Rancangan Program Kerja Agen Perubahan Tahun 2023	100%

### Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	91	91.12	100.13

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 (tiga) Komponen yaitu:

a) Penyerapan Anggaran;

Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran  $\geq 80\%$ . Apabila serapan anggaran di bawah  $< 80\%$  maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

b) Efisiensi;

Merupakan sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarasannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

c) Pencapaian output;

Komponen ini mengukur persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Adapun formulasi pengukuran indikator kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%  
 $\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$
2. Serapan Anggaran  $< 80\%$  dan output  $< 100\%$   
 $\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
3. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$ , namun output  $< 100\%$   
 $\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data yang secara rinci dapat dilihat dalam lampiran 4 (empat) bahwa capaian pada indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 sebesar 91.12% dari yang ditargetkan sebesar 91% dalam dokumen perjanjian kinerja atau setara 100.13%. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dimaksud, BKD melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam 60 Sub Kegiatan dan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 592.853.285.512,- atau setara 99.40% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 596.414.795.121,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	99,43%
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	90,91%
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	96,57%
4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	82,19%
5		Penyediaan Bahan/Material	100%	100,00%
6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	98,87%
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,62%
8		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	98,36%
9		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100,00%
10		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	96,78%
11		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,46%

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	93,65%
13		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	90,91%
14		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	98,23%
15		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	97,57%
16		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100,00%
17		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100,00%
18		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100,00%
19		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,39%
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100,00%
21		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	90,91%
22		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	91,53%
23		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	98,26%
24		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100,00%
25		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100,00%
26		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,33%
27		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	98,44%
28		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	88,98%
29		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100,00%
30		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	97,67%
31		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	99,15%
32		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	98,38%
33		Penyediaan Bahan/Material	100%	100,00%
34		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	99,82%
35		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	98,67%
36		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	88,69%
37		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	96,51%
38		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,67%
39		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100,00%
40		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	97,26%
41		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	97,16%
42		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100,00%

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
43		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100,00%
44		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,11%
45		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,94%
46		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,16%
47		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	99,58%
48		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100,00%
49		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100,00%
50		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,97%
51		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,68%
52		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	98,77%
53		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100,00%
54		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	93,23%
55		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	97,32%
56		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100,00%
57		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100,00%
58		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100,00%
59		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	97,52%
60		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99,05%

2. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah dalam RPJMD

Berikut ini dijabarkan perbandingan data capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra :

## Indikator Kinerja 1

Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	53.96	53.97	43.24	46.8	54
Capaian	47,09	41,36	43,24	42.12	N/A
% Capaian	87.3%	76.6%	100%	90%	N/A
% Capaian dengan target jangka menengah					N/A

Analisis perbandingan data capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah (tahun 2022) pada indikator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalisme ASN belum dapat dilakukan mengingat sampai dengan laporan ini disusun, data capaian belum dipublikasikan oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun mengacu pada data tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 87.3% menjadi 100%. Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa kegiatan secara rutin dan berkala diantaranya :

- a. Pelaksanaan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan PNS;
- b. Pelaksanaan bimtek pembinaan disiplin pegawai secara berkala;
- c. Supervisi dan monitoring penyusunan SKP dan PPK Perangkat Daerah secara berkala;
- d. Sinkronisasi data pegawai dalam SIMPEG dan SAPK melalui kegiatan rekonsiliasi secara berkala dengan BKN.

Namun pada tahun 2021 terdapat penurunan capaian dari 100% menjadi 90% dengan rincian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Perubahan
		2020	2021	
1.	<b>Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>43.24</b>	<b>42.12</b>	<b>(1.12)</b>
	- Dimensi Kualifikasi	13.18	13.04	(0.14)
	- Dimensi Kinerja	25.10	24.08	(1.02)
	- Dimensi Disiplin	4.96	5	0.04

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa dari 3 (tiga) dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2 (dua) dimensi yang mengalami trend penurunan capaian di tahun 2021 yaitu dimensi kualifikasi dan dimensi kinerja. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi kualifikasi dinilai dari aspek pendidikan formal PNS dengan bobot 25% dengan standar penilaian sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dihitung dari jenjang pendidikan yang tertinggi sampai dengan yang terendah sebagai berikut :

- a. Pendidikan S3 dengan nilai 25
- b. Pendidikan S2 dengan nilai 20
- c. Pendidikan S1 dengan nilai 15
- d. Pendidikan Diploma III dengan nilai 10
- e. Pendidikan SMA, Diploma I dan Diploma II dengan nilai 5
- f. Pendidikan dibawah SMA dengan nilai 1

Berdasarkan data per Desember 2022, dari total 54.577 pegawai sebanyak 93.24% pegawai jenjang pendidikan nya masih Strata 1 (S1) kebawah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. S3 : 71
- b. S2 : 3.619
- c. S1 : 31.439
- d. D4 : 201
- e. D3 : 5.188
- f. D2 : 715
- g. D1 : 142

h.	SMA	: 12.689
i.	SMP	: 379
j.	SD	: 134

Merujuk pada data statistik diatas, nilai Indeks Profesionalitas ASN dimensi kualifikasi sulit untuk dapat tercapai secara maksimal, meskipun BKD Provinsi DKI Jakarta rutin menyelenggarakan kegiatan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS. Untuk bisa mendapatkan nilai maksimal, Pemprov. DKI Jakarta perlu mendorong pegawai yang jenjang pendidikannya SMA kebawah untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun penurunan capaian pada dimensi kinerja disebabkan karena masih terdapat beberapa pegawai yang tidak menyusun penilaian prestasi kerja (PPK) tahun 2021 yang mayoritas adalah ASN dengan jabatan fungsional Guru. Beberapa upaya telah dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta melalui pelaksanaan sosialisasi kewajiban penyusunan baik Sasaran Kerja Pegawai maupun Penilaian Prestasi Kerja bagi seluruh ASN Provinsi DKI Jakarta termasuk jabatan fungsional guru serta penerbitan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 16/SE/2022 tentang Penyusunan dan Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022 yang didalamnya memuat informasi kepada para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda untuk memerintahkan seluruh PNS dilingkungan kerjanya masing-masing untuk menginput penilaian kinerja tahun 2021 paling lambat 30 April 2022, namun sampai dengan batas waktu input berakhir masih banyak yang belum melakukan penyusunan.

Namun, dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta upaya berkelanjutan dalam mengintegrasikan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan sistem informasi kediklatan (SIMDIKLAT) dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD Provinsi DKI Jakarta tetap optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) sebesar 52.

### Indikator Kinerja 2

#### Indeks Sistem Merit

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	N/A	N/A	N/A	290	326
Capaian	N/A	N/A	N/A	290	335,5
% Capaian	N/A	N/A	N/A	100%	102,91
% Capaian dengan target jangka menengah					102.91%

Target indikator kinerja indeks sistem merit baru mulai diperhitungkan pada tahun 2020 dikarenakan petunjuk teknis tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 baru diterbitkan pada Tahun 2019. Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, nilai indeks sistem merit tahun 2022 dapat dicapai dengan nilai 335,5 dari target yang ditetapkan sebesar 326. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- b. Pelaksanaan diklat latsar CPNS;
- c. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta;
- d. Penetapan Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
- e. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- f. Pengembangan sistem informasi manajemen talenta (*talent pool*);
- g. Pelaksanaan uji kompetensi pegawai;
- h. Penyusunan rancangan standar kompetensi teknis Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;

- i. Melaksanakan analisis kesenjangan (*gap*) kualifikasi melalui aplikasi SiPetkom;
- j. Pengembangan modul riwayat penjatuhan sanksi kode etik/kode perilaku dalam SIMPEG;
- k. Penyelesaian rancangan Keputusan Gubernur tentang Pola Karir PNS beserta lampirannya sampai pada tahap penetapan;
- l. Pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai berprestasi.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 326, maka capaian indeks sistem merit tahun 2022 sudah mencapai 102,91%. Hal tersebut tidak lepas dari adanya dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah yang berkontribusi langsung mendukung pencapaian seluruh aspek penerapan sistem merit khususnya aspek pengembangan karir serta aspek promosi dan mutasi, BKD Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

### Indikator Kinerja 3

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	N/A	N/A	100%	91%	91%
Capaian	N/A	N/A	89.5%	91.8	91.12
% Capaian	N/A	N/A	89.5%	100.8%	100.13
% Capaian dengan target jangka menengah					100.13%

Target indikator kinerja persentase kualitas pelaksanaan anggaran baru mulai diperhitungkan pada tahun 2020. Berdasarkan data evaluasi yang disajikan dalam tabel diatas, persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 91.12% atau setara 100.13% dari target yang ditetapkan sebesar 91%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan para pengampu/penanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan, sub kegiatan dan penjabaran aktivitas sub kegiatan (PASK) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai target yang telah ditetapkan;
- b. Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh progress pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan dan rincian penjabaran aktivitas sub kegiatan (PASK) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

### 3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran		% Efisiensi
			Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	
1.	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	N/A	13.907.362.324	13.083.701.235	8.58%
2.	Indeks Sistem Merit	1.0291			
3.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1.0013	596.414.795.121	592.853.285.512	0.73%
<b>Rata-rata</b>					<b>4.65%</b>

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 4.65%.

#### 4. Perbandingan Capaian Nasional

##### ❖ Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN

Capaian indikator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 secara nasional belum dipublikasikan oleh oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga capaiannya belum dapat diperbandingkan.

##### ❖ Indeks Sistem Merit

Capaian indeks sistem merit secara nasional tahun 2022 belum dipublikasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga BKD Provinsi DKI Jakarta hanya dapat melakukan analisis perbandingan capaian indeks sistem merit tahun 2022 dengan hasil penilaian pada KASN pada 18 Provinsi di tahun 2021 yang bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KASN Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.8. Hasil Penilaian pada Provinsi Tahun 2021**

No	Nama Instansi	Nilai	Kategori
1.	Provinsi Sulawesi Selatan	340.5	Sangat Baik
2.	Provinsi Jawa Tengah	335.5	Sangat Baik
3.	Provinsi Bali	330.0	Sangat Baik
4.	Provinsi Kalimantan Barat	313.0	Baik
5.	Provinsi DKI Jakarta	310.5	Baik
6.	Provinsi Banten	309.5	Baik
7.	Provinsi Riau	297.5	Baik
8.	Provinsi Kepulauan Riau	296.5	Baik
9.	Provinsi Sumatera Barat	295.5	Baik
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	288.0	Baik
11.	Provinsi Sumatera Utara	263.5	Baik
12.	Provinsi Aceh	257.0	Baik
13.	Provinsi Kalimantan Timur	256.0	Baik
14.	Provinsi Gorontalo	254.5	Baik
15.	Provinsi Sulawesi Tengah	168.0	Buruk
16.	Provinsi Maluku	167.0	Buruk
17.	Provinsi Lampung	161.5	Buruk
18.	Provinsi Kalimantan Utara	133.0	Buruk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KASN) Tahun 2021

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian Indeks Sistem Merit tahun 2022 sebesar 335.5 atau setara 0.81 akan menempatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada posisi 3 (tiga) setelah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 340.5 dan sejajar dengan Provinsi Jawa Tengah dengan perolahan nilai yang sama sebesar 335.5. Selanjutnya, capaian Indeks Sistem Merit tahun 2022 sebesar 335.5 atau setara 0.81 juga telah melampaui target nasional yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 2020 – 2024 yang hanya sebesar 0.70 di tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2020, sebagai berikut:

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI						
	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi					
	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional	Skor 41 (Cukup Efektif)	Skor 45 (Cukup Efektif)	Skor 50 (Cukup Efektif)	Skor 56 (Cukup Efektif)	Skor 61 (Efektif)
	Indeks SPBE	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6
	% K/L/D yang mencapai predikat SPBE "Baik"	45 IP	90 IP	150 IP	257 IP	371 IP
	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera					
	Indeks Sistem Merit ASN Nasional	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
	Indeks Profesionalitas ASN Nasional	71	73	76	78	80

❖ **Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Tidak dapat dilakukan perbandingan antara capaian BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional maupun Pemerintahan Daerah lainnya untuk indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran karena data pembandingan tidak tersedia.

**B. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, berikut ini dijabarkan data capaian indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022:

1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin. Adapun indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kualifikasi (bobot 25%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

1. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
2. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
3. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
4. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
5. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-1 (Diploma-Satu)/SLTA Sederajat;
6. Pendidikan di bawah SLTA.

b. Kompetensi (bobot 40%)

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :

1. Diklat Kepemimpinan;
2. Diklat Fungsional;
3. Diklat Teknis;
4. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara

c. Kinerja (bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi :

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
2. Perilaku Kerja.

d. Disiplin (bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
2. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat).

Dari 4 (empat) dimensi Indeks Profesionalitas ASN diatas, sebanyak 3 (tiga) dimensi diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin. Adapun untuk dimensi kompetensi diampu oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta, berikut ini disajikan data target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 :

Indikator Kinerja Utama 1				
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	90.00	N/A	N/A

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, sesuai surat Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 4.547/-078 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penyampaian Usulan Revisi Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Tahun 2017-2022, BKD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan perubahan target pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN sehingga pada tahun 2022 target dalam dokumen perubahan RPJMD dan Renstra berubah dari 90.00 menjadi 81. Namun, perubahan target dimaksud tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 sehingga target indikator kinerja utama (IKU) pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 masih tetap mengacu pada surat keputusan dimaksud sebesar 90.00.

Selanjutnya terhadap hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022, BKD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan surat kepada Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta nomor e-0786/RB.02.07 tanggal 30 Desember 2022 perihal Laporan penghitungan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Tahun 2022 dengan tembusan Asisten Pemeintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta yang secara substansi menginformasikan timeline penghitungan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai berikut:

Waktu	Rincian Kegiatan
<b>April – Desember 2022</b>	Instansi melakukan pemutakhiran data riwayat kepegawaian terkait dimensi penilaian IP ASN pada SAPK
<b>Desember 2022 – Januari 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktorat Jabatan ASN melaksanakan rekonsiliasi data dari SAPK ke Aplikasi IP ASB secara berkala</li> <li>b. Instansi melakukan konfirmasi pengukuran IP ASN Tahun 2021 ke Aplikasi IP ASN dengan mengupload surat pernyataan</li> </ul>

**Februari 2023**

Direktorat Jabatan ASN melakukan penyusunan laporan dan publikasi nilai IP ASN

Merujuk pada timeline penghitungan diatas, maka sampai dengan laporan ini disusun data capaian / realisasi Indeks Profesionalitas ASN belum dapat dipublikasikan karena masih dalam tahapan konfirmasi pengukuran, verifikasi dan validasi oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi IP ASN.

#### Indikator Kinerja Utama 2

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Skor/ Indeks	93	93.59	100.63%

Survei Kepuasan Pelayanan yang dilaksanakan BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan dimaksud disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan ini terdiri dari 9 unsur yaitu :

- 1) **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 3) **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 4) **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- 7) **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- 8) **Penanganan pengaduan**, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 9) **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pada Tahun 2022, BKD melaksanakan survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara *online* melalui link : [https://bitly.com/layanan\\_kepegawaian](https://bitly.com/layanan_kepegawaian).

tercatat sebanyak 3.489 orang dari seluruh Perangkat Daerah telah berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara online. Adapun rata-rata nilai pada setiap unsur pelayanan yang dinilai adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan	Nilai IKM Per Unsur Pelayanan	Keterangan	
U1	Persyaratan	3489	3.46	B	Survei kepuasan pelayanan kepegawaian dilakukan secara online melalui link : <a href="https://bitly.com/layanan_kepegawaian">https://bitly.com/layanan_kepegawaian</a>	
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3489	3.70	A		
U3	Waktu Penyelesaian	3489	3.33	B		
U4	Biaya/Tarif	3489	3.97	A		
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3489	3.89	A		
U6	Kompetensi Pelaksana	3489	3.91	A		
U7	Perilaku Pelaksana	3489	3.92	A		
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3489	3.91	A		
U9	Sarana dan Prasarana	3489	3.94	A		
Nilai Capaian					93,59	Kualitas Mutu A Sangat Baik
Target Capaian					93,00	
Persentase Capaian					100,63%	

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta sebesar 93.59 berada pada interval mutu pelayanan "A" dengan kategori kinerja unit pelayanan "Sangat Baik". Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 4 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.1.966.566.550,- atau setara 95.10% dari total pagu anggaran sebesar Rp.2.067.949.416,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100%	99,86%
2		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	99,03%
3		Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	94,57%
4		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	87,23%

2. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya Dan Target Jangka Menengah Dalam RPJMD

Berikut ini dijabarkan perbandingan data capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra :

Indikator Kinerja Utama 1					
Indeks Profesionalitas ASN					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	89.95	89.96	89.97	89.99	90
Capaian	73.21	80.53	74.06	80.74	N/A
% Capaian	81.39%	89.52%	82.32%	89.81%	N/A
% Capaian dengan target jangka menengah					N/A

Analisis perbandingan data capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah (tahun 2022) pada indikator Indeks Profesionalisme ASN belum dapat dilakukan mengingat sampai dengan laporan ini disusun, data capaian belum dipublikasikan oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Indikator Kinerja Utama 2					
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	78	81	86	90	93
Capaian	86.06	87.03	87.23	90.96	93.59
% Capaian	110.33%	107.44%	101.43%	101.07%	100.63
% Capaian dengan target jangka menengah					100.63%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian tahun 2022 dapat tercapai sebesar 93.59 dari yang ditargetkan sebesar 93 atau setara 100.63%.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan dalam mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain :

- a. Sistem informasi penghargaan;
- b. Sistem informasi *talent pool*;
- c. Sistem informasi peta kompetensi;
- d. Sistem informasi jabatan fungsional;
- e. Sistem informasi e-Disiplin;
- f. Sistem informasi e-SKP.

### 3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran		% Efisiensi
			Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	
1.	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	13.907.362.324	13.083.701.235	N/A
2.	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	1,0063	2.067.949.416	1.965.366.550	5.56%
<b>Rata-rata</b>					<b>5.56%</b>

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar **5.56%**.

#### 4. Perbandingan capaian nasional

##### ❖ Indeks Profesionalitas ASN

Capaian indeks Profesionalitas ASN secara nasional tahun 2022 belum dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN dan RB, sehingga BKD Provinsi DKI Jakarta hanya dapat melakukan analisis capaian dengan membandingkan capaian tahun 2021 dengan target nasional tahun 2022 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 2020 – 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2020, sebagai berikut:

KEMENTERIAN/LEMBAGA : [048] KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>						
	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi					
	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional	Skor 41 (Cukup Efektif)	Skor 45 (Cukup Efektif)	Skor 50 (Cukup Efektif)	Skor 56 (Cukup Efektif)	Skor 61 (Efektif)
	Indeks SPBE	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6
	% K/L/D yang mencapai predikat SPBE "Baik"	45 IP	90 IP	150 IP	257 IP	371 IP
	Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera					
	Indeks Sistem Merit ASN Nasional	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
	Indeks Profesionalitas ASN Nasional	71	73	76	78	80

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2022 nilai Indeks Profesionalitas ASN secara nasional ditargetkan sebesar 76, capaian Pemprov. DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 80.74 sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemprov. DKI Jakarta menggunakan hasil pengukuran tahun 2021 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan secara nasional, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Capaian DKI Tahun 2021	Target Nasional Tahun 2022	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	80.74	76	106.2%

#### ❖ Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian

Tidak dapat dilakukan analisis perbandingan dengan capaian Nasional maupun Pemerintahan Daerah lainnya karena ketidakterediaan data pembandingan.

### C. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah operasionalnya dituangkan ke dalam program dan indikator kinerja yang pencapaiannya dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Realisasi capaian indikator kinerja program

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur				
Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	Nilai	90	102.91	114.23%

Indikator kinerja indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PPK). Adapun nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :

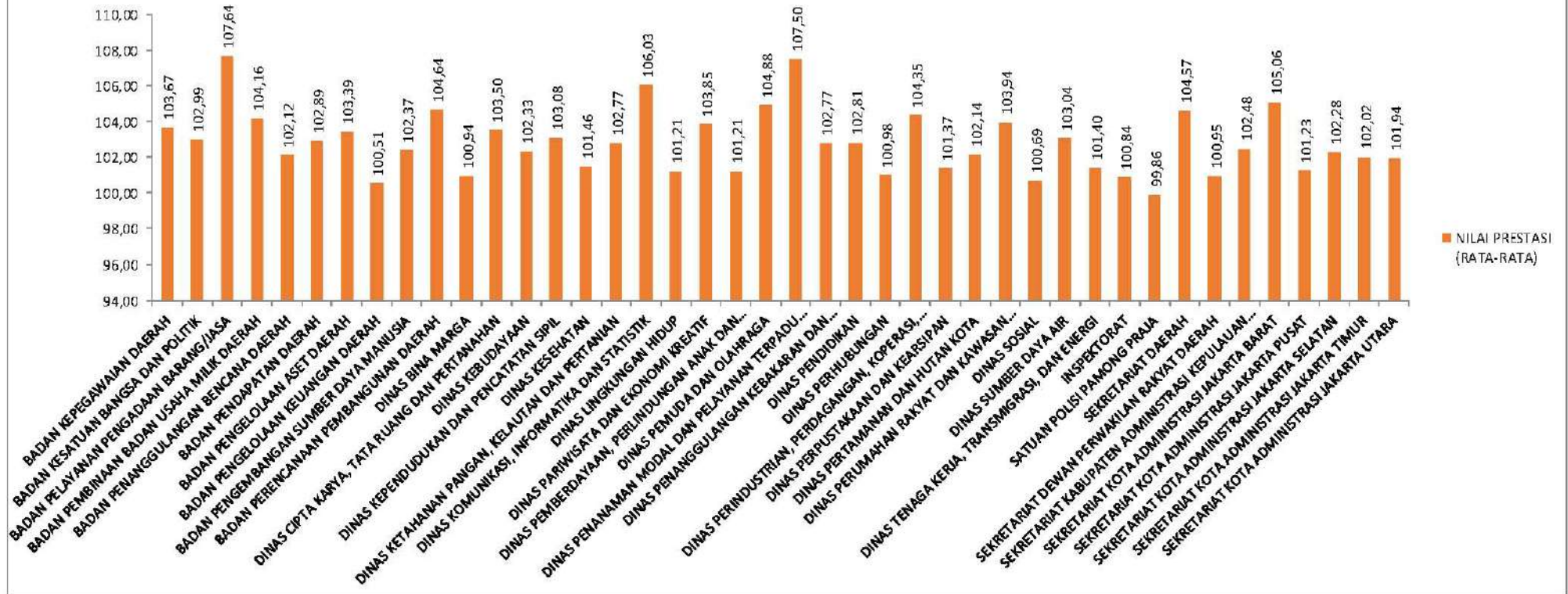
- a. 91 - ke atas : Sangat Baik
- b. 76-90 : Baik
- c. 61-75 : Cukup
- d. 51-60 : Kurang
- e. 50 ke bawah : Buruk

Perhitungan indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta dilakukan dengan cara menggabungkan (rata-rata) antara unsur penilaian **SKP** dan unsur penilaian **Perilaku Kerja** yang dilaksanakan oleh Pejabat Penilai pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi capaian, dari jumlah pegawai sesuai listing gaji Januari 2023 sebanyak 44.641 orang di 42 Perangkat Daerah diperoleh nilai rata-rata indeks capaian kinerja sebesar 102,81.91 melebihi target yang ditetapkan sebesar 90 (114.23%). Pencapaian dimaksud didukung melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 4 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 573.200.000,- atau setara 96.88% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 591.650.000,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut:

No	Program	Sub Kegiatan	Realisasi anggaran (%)	Realisasi output (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	85,33%	100%
2		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95,38%	100%
3		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98,55%	100%
4		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100,00%	100%

Selanjutnya dijabarkan pula data realisasi indeks capaian kinerja ASN Perangkat Daerah tahun 2022 sebagai berikut :

INDEKS CAPAIAN KINERJA ASN



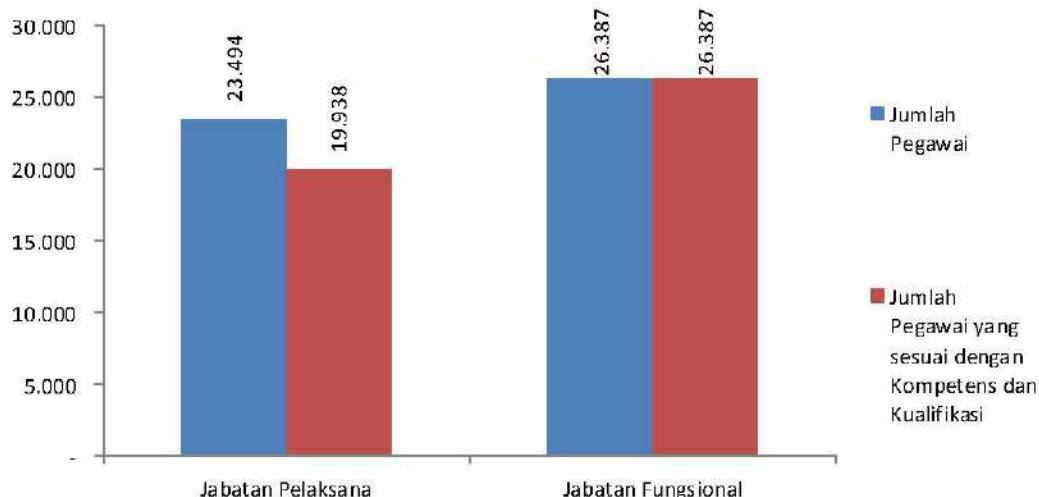
### Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur

Indikator Kinerja 2	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi	%	85%	92.87%	109.25%

Indikator kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian (kompetensi dan kualifikasi) jabatan pelaksana dan jabatan fungsional (JF) yang terisi dibandingkan dengan seluruh jumlah formasi jabatan yang ada. Seluruh pejabat pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui SK penempatan jabatan pelaksana berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim yang dinilai dari kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki PNS dengan syarat kompetensi dan kualifikasi dalam Analisa Jabatan telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan RB serta mempedomani Pergub Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa pengangkatan pejabat fungsional dapat dikategorikan telah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dipersyaratkan apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Hasil evaluasi capaian menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai sesuai listing gaji Desember 2022 sebanyak 49.881 orang, sebanyak 46.325 orang (92.87%) telah mengisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sehingga target indikator kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi tahun 2022 dapat terealisasi 109.26%, dengan rincian sebagai berikut :



Pencapaian pada indikator dimaksud didukung melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 6 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 4.676.533.677,- atau setara 91.95% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.086.046.954,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut:

No	Program	Sub Kegiatan	Capaian Rrealisasi Output (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	98,21%
2		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	96,23%
3		Pengelolaan Mutasi ASN	100%	99,28%
4		Pengelolaan Promosi ASN	100%	92,78%
5		Pengelolaan Assessment Center	100%	92,35%
6		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100%	55,91%

### Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur

Indikator Kinerja 3	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	%	13%	20,83%	160.23%

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Di dalam peraturan tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BKD Provinsi DKI Jakarta memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang merupakan kewenangan pejabat eselon I, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Gubernur.

Capaian indikator persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD diperoleh dengan cara menghitung trend jumlah kasus pelanggaran disiplin kewenangan Sekda dan Gubernur yang diproses oleh BKD pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, BKD Provinsi DKI Jakarta menargetkan Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sebesar 13% (tiga belas persen) dengan tingkat realisasi sebesar 20.83% atau setara 160.23%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Hukuman Disiplin	Capaian Tahun 2022				
		Jumlah Keputusan Hukuman Disiplin pada Tahun		Jumlah Perubahan	% Perubahan	Keterangan Perubahan 2021 - 2022
		2021	2022			
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = (5/3) * 100%	7
1	Ringan	3	0	3	100,00%	Penurunan
2	Sedang	8	0	8	100,00%	Penurunan
3	Berat	13	19	-6	-46,15%	Peningkatan
<b>Nilai Capaian</b>		<b>24</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>20,83 %</b>	<b>Penurunan</b>
<b>Target Capaian</b>					<b>13,00 %</b>	
<b>Persentase Capaian</b>					<b>160,26%</b>	

Pencapaian pada indikator dimaksud didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 39.600.000,- atau setara 100% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 39.600.000,- dengan tingkat capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Capaian Realisasi Output (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	Pembinaan Disiplin ASN	100%	100%
2		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	100%

### Sasaran Strategis 2

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Nilai	93	93,59	100,63

Survei Kepuasan Pelayanan yang dilaksanakan BKD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam Permenpan dimaksud disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan ini terdiri dari 9 unsur yaitu :

- 1) **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 3) **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

- 4) **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- 6) **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- 7) **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- 8) **Penanganan pengaduan**, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 9) **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pada Tahun 2022, BKD melaksanakan survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara *online* melalui link : [https://bitly.com/layanan\\_kepegawaian](https://bitly.com/layanan_kepegawaian), tercatat sebanyak 3.489 orang dari seluruh Perangkat Daerah telah berpartisipasi dalam pengisian survei kepuasan pelayanan kepegawaian secara online. Adapun rata-rata nilai pada setiap unsur pelayanan yang dinilai adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan	Nilai IKM Per Unsur Pelayanan	Keterangan	
U1	Persyaratan	3489	3.46	B	Survei kepuasan pelayanan kepegawaian dilakukan secara online melalui link : <a href="https://bitly.com/layanan_kepegawaian">https://bitly.com/layanan_kepegawaian</a>	
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3489	3.70	A		
U3	Waktu Penyelesaian	3489	3.33	B		
U4	Biaya/Tarif	3489	3.97	A		
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3489	3.89	A		
U6	Kompetensi Pelaksana	3489	3.91	A		
U7	Perilaku Pelaksana	3489	3.92	A		
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3489	3.91	A		
U9	Sarana dan Prasarana	3489	3.94	A		
<b>Nilai Capaian</b>					<b>93,59</b>	<b>Kualitas Mutu A Sangat Baik</b>
<b>Target Capaian</b>					<b>93,00</b>	
<b>Persentase Capaian</b>					<b>100,63%</b>	

Sebagaimana terlihat pada data diatas, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta sebesar 93.59 berada pada interval mutu pelayanan “A” dengan kategori kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 4 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.1.966.566.550,- atau setara 95.10% dari total pagu anggaran sebesar Rp.2.067.949.416,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Rata-rata Capaian Output (%)	Capaian Anggaran (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100%	99,86%
2		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	99,03%
3		Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	94,57%
4		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	87,23%

### Sasaran Strategis 2

Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

Indikator Kinerja 2	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan KORPRI	Nilai	90	93.09	103.43%

Sebagaimana survei yang dilaksanakan untuk mengukur kepuasan pelayanan kepegawaian, survei kepuasan layanan KORPRI juga dilaksanakan secara *online* melalui link : <https://bit.ly/surveykepuasanfasilitasilembagaprofesiASNTW4> dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Bahwa, dari total responden sebanyak 2.622 orang diperoleh nilai indeks sebesar 93.09 dengan interval mutu pelayanan "A" berada pada kategori kinerja unit pelayanan "Sangat Baik", dengan rincian sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Unsur per Pelayanan	Nilai IKM Per Unsur Pelayanan	Keterangan	
U1	Persyaratan	2622	3,73	A	Survey kepuasan pelayanan KORPRI Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara online melalui link : <a href="https://bit.ly/surveykepuasanfasilitasilembagaprofesiASNTW4">https://bit.ly/surveykepuasanfasilitasilembagaprofesiASNTW4</a>	
U2	Mekanisme	2622	3,65	A		
U3	Waktu Pelayanan	2622	3,72	A		
U4	Biaya	2622	3,95	A		
U5	Produk Layanan	2622	3,67	A		
U6	Kompetensi Pelayanan	2622	3,70	A		
U7	Perilaku Pelayanan	2622	3,68	A		
U8	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	2622	3,69	A		
U9	Sarana dan Prasarana	2622	3,72	A		
Nilai Capaian					93,09	Mutu Pelayanan A Sangat Baik
Target Capaian					90,00	
Persentase Capaian					103,43%	

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan KORPRI, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 2.769.090.350,- atau setara 97.83% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.830.479.190,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

No	Program	Sub Kegiatan	Capaian Realisasi Output (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100%	97,83%

- Perbandingan capaian tahun sebelumnya dan target jangka menengah dalam RPJMD

Berikut ini dijabarkan perbandingan data capaian indikator kinerja program tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra :

Indikator Kinerja 1					
Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	82	84	86	88	90
Capaian	83	86.22	84.84	88.91	102.91
% Capaian	101.22%	102.64%	98.65%	101.03%	114.23%
% Capaian dengan target jangka menengah					114.23%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta tahun 2022 dapat tercapai sebesar 102.91 atau setara 114.23% melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 90. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah serta pengembangan sistem informasi SKP secara berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta ditetapkannya beberapa kebijakan antara lain :

- a. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 16/SE/2022 tentang Penyusunan dan Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022;
- b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 54/SE/2022 tentang Penyesuaian Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022;

#### Indikator Kinerja 2

Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	55%	70%	75%	80%	85%
Capaian	68%	75.29%	81.74%	81.17%	92.87%
% Capaian	123.64%	107.56%	108.99%	101.46%	109.25%
% Capaian dengan target jangka menengah					109.25%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi tahun 2022 dapat tercapai sebesar 92.87% atau setara 109.25% melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 85%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian dan program Kepegawaian Daerah serta dilakukannya beberapa upaya konkret sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan yang dibarengi implementasi kebijakan manajemen talenta dan pola karir ASN di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta
- b. Verifikasi dan validasi usulan penempatan/pengangkatan jabatan pelaksana Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dengan mempedomani Pergub Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana;
- c. Pembinaan terhadap pemangku jabatan fungsional di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;
- d. Pemutakhiran data potret kompetensi ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi pegawai secara berkala;

## Indikator Kinerja 3

Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	5%	7%	9%	11%	13%
Capaian	8%	30.35%	80%	14.29%	20.83%
% Capaian	160%	433.55%	888.89%	129.87%	160.23%
% Capaian dengan target jangka menengah					160.23%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi kewenangan BKD tahun 2022 dapat tercapai sebesar 20.83% atau setara 160.23% melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 13%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring kehadiran pegawai melalui e-absensi secara daring (on-line);
- b. Monitoring dan evaluasi disiplin pegawai dalam bentuk inspeksi mendadak secara langsung ke SKPD/UKPD;
- c. Bimbingan teknis pembinaan disiplin pegawai secara berkala;
- d. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain upaya-upaya diatas, faktor pendorong utama terealisasinya indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kesadaran PNS terhadap disiplin pegawai karena penerapan *reward and punishment* melalui kebijakan pemberian TKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2019. Adapun kebijakan dimaksud mengatur terkait pemberian TKD bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, yaitu tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
- 1) teguran lisan, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan;
  - 2) teguran tertulis, tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan; dan
  - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD selama 3 (tiga) bulan.
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang berupa :
- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan.
  - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 18 (delapan belas) bulan.
- c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa :
- 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD selama 24 (dua puluh empat) bulan;
  - 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan TKD selama 30 (tiga puluh) bulan; dan
  - 3) pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

#### Indikator Kinerja 4

Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	78	81	86	90	93
Capaian	86.06	87.03	87.23	90.96	93.59
% Capaian	110.33%	107.44%	101.43%	101.07%	100.63%
% Capaian dengan target jangka menengah					100.63%

Berdasarkan data evaluasi capaian yang disajikan dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator indeks kepuasan pelayanan kepegawaian tahun 2022 dapat tercapai sebesar 93.59 atau setara 100.63% melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan

sebesar 93. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dilakukannya pengembangan sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan dalam mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain :

- a. Sistem informasi penghargaan;
- b. Sistem informasi *talent pool*;
- c. Sistem informasi peta kompetensi;
- d. Sistem informasi jabatan fungsional;
- e. Sistem informasi e-Disiplin;
- f. Sistem informasi e-SKP.

### 3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran		% Efisiensi
			Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	
1.	Indeks Capaian Kinerja ASN Pemrov. DKI Jakarta	1,1423	591.650.000	573.200.000	15,19%
2.	Persentase Jabatan yang diisi sesuai	1,0925	5.086.046.954	4.464.311.677	19,66%

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran		% Efisiensi
			Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	
	dengan Kompetensi dan Kualifikasi				
3.	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD	1,6023	39.600.000	39.600.000	37,59%
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	1,0063	2.067.949.416	1.965.366.550	5,56%
5.	Indeks Kepuasan Layanan KORPRI	1,0343	6.122.115.954	6.041.223.008	4,59%
<b>Rata-rata</b>					<b>16.52%</b>

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta terhadap capaian indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebesar 16.52%.

#### 4. Perbandingan capaian nasional

Tidak dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap seluruh capaian indikator kinerja program BKD Provinsi DKI Jakarta dengan capaian Nasional maupun Pemerintahan Daerah lainnya karena ketidakterediaan data perbandingan.

### D. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD), pada tahun 2022 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan strategis daerah (KSD) dengan 58 (lima puluh delapan) rencana aksi yang secara umum rata-rata capainnya sebesar 99.86%. Berikut ini ditampilkan grafik pencapaian rencana aksi KSD secara triwulanan :

### Triwulan I



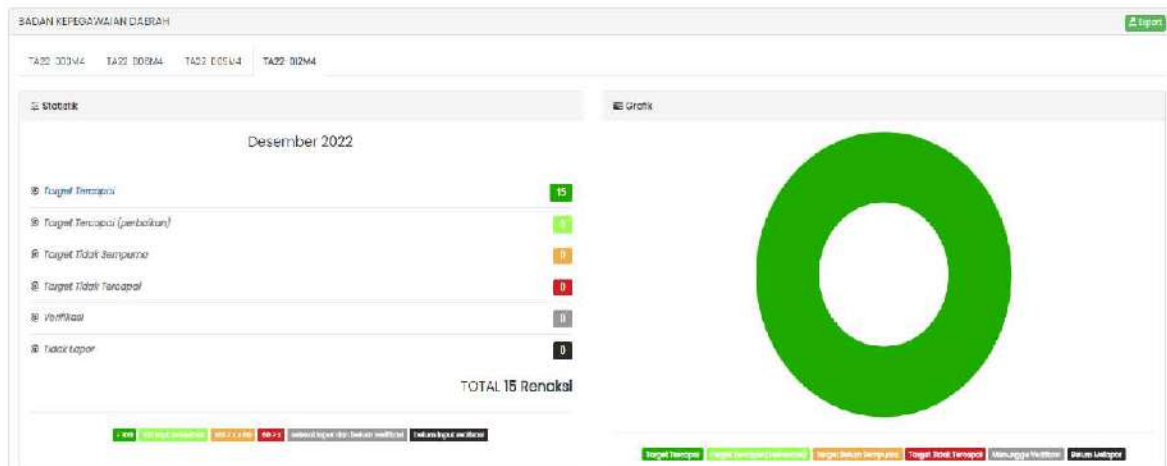
### Triwulan II



### Triwulan III



Triwulan IV



Dari hasil evaluasi sebagaimana ditampilkan dalam grafik-grafik diatas, diperoleh informasi bahwa seluruh target rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) yang ditetapkan pada triwulan I, III dan IV dapat tercapai seluruhnya. Sementara pada triwulan II terdapat 1 (satu) target rencana aksi pada KSD 68 “Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta” yang tidak tercapai secara sempurna yaitu penetapan Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja. Penyelesaian rencana aksi dimaksud baru dapat dilaksanakan pada triwulan III karena BKD harus melakukan penyesuaian nilai-nilai budaya kerja yang tertuang dalam Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN.

Adapun data rekapitulasi capaian rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) tahun 2021 secara rinci disajikan dalam lampiran 5 (lima).

E. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

Berikut ini disajikan informasi capaian indikator kinerja sasaran khusus dan operasional Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
<b>Sasaran Khusus</b>				
1	Terwujudnya pengelolaan assessment center yang berbasis web	Persentase penyelesaian pengembangan sistem Computer Assisted Test (CAT) berbasis web	100%	100%
2	Terinternalisasinya nilai-nilai Kode Etik dan Kode Prilaku	Persentase tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai Kode etik dan Kode Prilaku	80%	89%
3	Tersujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini Laporan Keuangan	(3) WTP	(3) WTP
4	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	AA (91)	AA (96,26)
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	98.11
8	Peningkatan penggunaan e_office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	100%
9	Peningkatan penggunaan e-Produk Hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	100%
<b>Sasaran Operasional</b>				
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%

## F. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Berikut ini disajikan informasi komposisi Perubahan APBD BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 :

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%
<b>Total Belanja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022</b>				<b>610.322.157.445</b>	<b>605.936.986.747</b>	<b>99,28%</b>
<b>1</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Total Belanja Program Kepegawaian Daerah</b>		<b>13.907.362.324</b>	<b>13.083.701.235</b>	<b>94,08%</b>
		<b>Indeks Capaian Kinerja ASN</b>		<b>591.650.000</b>	<b>573.200.000</b>	<b>96,88%</b>
		Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	55.200.000	47.100.000	85,33%
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	156.000.000	148.800.000	95,38%
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	217.800.000	214.650.000	98,55%
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	162.650.000	162.650.000	100,00%
		<b>Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi</b>		<b>5.086.046.954</b>	<b>4.464.311.677</b>	<b>87,78%</b>
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	50.400.000	49.500.000	98,21%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	197.155.000	189.725.000	96,23%
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	90.946.714	90.291.837	99,28%
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	594.890.000	382.668.000	64,33%
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	3.930.871.240	3.630.266.840	92,35%
		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	111.180.000	62.160.000	55,91%
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	20.994.000	11.400.000	54,30%
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	23.010.000	14.100.000	61,28%
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	22.200.000	12.000.000	54,05%
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	22.200.000	10.800.000	48,65%

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	22.200.000	11.400.000	51,35%
		<b>Persentase Penurunan Tingkar Pelanggaran Disiplin</b>		<b>39.600.000</b>	<b>39.600.000</b>	<b>100,00%</b>
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	21.600.000	21.600.000	100,00%
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.000.000	18.000.000	100,00%
		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian</b>		<b>2.067.949.416</b>	<b>1.965.366.550</b>	<b>95,04%</b>
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	247.800.000	246.600.000	99,52%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	511.500.000	506.550.000	99,03%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	292.099.416	276.231.550	94,57%
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	623.950.000	544.285.000	87,23%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	115.000.000	115.000.000	100,00%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	102.000.000	102.000.000	100,00%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	36.600.000	36.600.000	100,00%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	69.500.000	68.600.000	98,71%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	69.500.000	69.500.000	100,00%
		<b>Indeks Kepuasan Layanan Korpri</b>		<b>6.122.115.954</b>	<b>6.041.223.008</b>	<b>98,68%</b>

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.830.479.190	2.769.090.350	97,83%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3.291.636.764	3.272.132.658	99,41%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<b>Total Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>596.414.795.121</b>	<b>592.853.285.512</b>	<b>99,40%</b>
		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor</b>		<b>596.171.330.037</b>	<b>592.615.548.666</b>	<b>99,40%</b>
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	589.805.573.492	586.466.284.606	99,43%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.820.000	16.200.000	90,91%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.647.151.204	2.556.315.450	96,57%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	243.217.595	199.908.225	82,19%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.856.800	62.146.200	98,87%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.600.000	182.900.000	99,62%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	113.905.281	112.033.000	98,36%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.699.000	171.698.379	100,00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.459.492	98.922.090	99,39%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.461.645	54.750.750	93,65%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550.000	500.000	90,91%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	167.243.521	164.275.843	98,23%

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%
			Kantor			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.300.290	95.906.775	97,57%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.640.000	8.640.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.200.000	68.200.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.461.600	37.461.276	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.378.810	8.327.886	99,39%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.130.838	7.130.838	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	880.000	800.000	90,91%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.506.743	115.787.325	91,53%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.159.670	92.518.500	98,26%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.400.000	14.400.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.800.000	49.800.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.461.600	37.212.000	99,33%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.953.860	5.860.800	98,44%

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.616.580	3.218.000	88,98%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288.863.218	282.119.060	97,67%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.481.517	8.409.360	99,15%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.691.650	30.195.000	98,38%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.658.230	64.542.500	100,82%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	510.336.592	503.537.098	98,67%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.769.600	199.350.000	88,69%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.266.831	83.989.260	99,67%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000	500.000	100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.461.677	87.014.765	97,26%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.145.568	91.475.100	97,16%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.280.000	8.280.000	100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.304.000	11.304.000	100,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.461.600	37.128.000	99,11%

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.463.180	8.458.200	99,94%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.977.826	181.448.280	99,16%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.602.404	22.507.470	99,58%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.100.000	38.100.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.461.600	37.450.680	99,97%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.801.494	10.767.000	99,68%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.038.968	4.977.240	98,77%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000	300.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.130.123	63.517.190	93,23%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.188.848	96.533.370	97,32%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.164.000	14.164.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.600.000	44.600.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.339.800	34.339.800	100,00%

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.509.042	5.372.400	97,52%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.504.248	3.470.970	99,05%
		<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional</b>		<b>243.465.084</b>	<b>237.736.846</b>	<b>97,65%</b>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Bahan/Material	50.732.000	50.732.000	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.204.270	83.431.698	96,78%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Bahan/Material	21.859.506	21.859.506	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.669.308	81.713.642	96,51%

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, bahwa dari total pagu anggaran sebesar **Rp 610.322.157.445,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 605.936.986.747,-** atau **99.28%**. Persentase penyerapan tahun 2022 ini meningkat apabila dibandingkan tahun 2021 yang hanya terealisasi dengan tingkat persentase sebesar **98.44%**. Meskipun terdapat kenaikan trend realisasi anggaran, masih terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang realisasi anggaran nya belum optimal sebagai berikut :

No	Program	PD / UKPD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Kepegawaian Daerah	BKD	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	594.890.000	382.668.000	64%	Anggaran tidak dapat terealisasi secara optimal karena pelaksanaan seleksi terbuka JPT Madya pada jabatan Sekretaris Daerah sesuai dengan pengumuman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 hanya sampai dengan tahapan seleksi administrasi sehingga anggaran yang semula dialokasikan untuk wawancara dengan tim panel tidak dapat terealisasi.
BKD		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	111.180.000	62.160.000	56%	Anggaran tidak dapat terealisasi secara optimal karena honorarium rohaniawan yang semula dialokasikan untuk 7 kali pelantikan hanya terealisasi sebanyak 5 kali pelantikan.	
SUBAN JT		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	20.994.000	11.400.000	54%	Anggaran tidak dapat terealisasi secara optimal karena kegiatan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali hanya terealisasi sebanyak 1 kali karena bergantung dengan kebijakan Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK)	
SUBAN JS		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	23.010.000	14.100.000	61%	Anggaran tidak dapat terealisasi secara optimal karena kegiatan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali hanya terealisasi sebanyak 1 kali karena bergantung dengan kebijakan Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK)	
SUBAN JB		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	22.200.000	12.000.000	54%	Anggaran tidak dapat terealisasi secara optimal karena kegiatan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali hanya terealisasi sebanyak 1 kali karena bergantung dengan kebijakan Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK)	

No	Program	PD / UKPD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
		SUBAN JU	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	22.200.000	10.800.000	49%	Anggaran tidak dapat terealisasi secara optimal karena kegiatan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali hanya terealisasi sebanyak 1 kali karena bergantung dengan kebijakan Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK)
		SUBAN JP	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	22.200.000	11.400.000	51%	Anggaran tidak dapat terealisasi secara optimal karena kegiatan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali hanya terealisasi sebanyak 1 kali karena bergantung dengan kebijakan Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK)

## BAB. IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2022. Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik dan Baik. tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

## B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Peningkatan alokasi anggaran pada program kepegawaian yang menjadi pengungkit capaian indeks profesionalitas ASN dan indeks sistem merit.
2. Mengoptimalkan peran *controlling* pada internal BKD Provinsi DKI Jakarta agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi pemerintah pusat, mengingat terdapat beberapa target kinerja (baik di level tujuan, program, kegiatan maupun sub kegiatan) BKD Provinsi DKI Jakarta yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti BKN, KASN, Kementerian PAN dan RB dan lain-lain.

**Lampiran 1 :**  
**Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BKD Provinsi DKI Jakarta**



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  2. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20JM.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun:

1. Rencana kerja dan anggaran;
2. Penetapan kinerja;
3. Laporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Desember 2018

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, k



*Budi Hastuti*  
Budi Hastuti

NIP. 195903151985032005

Nomor : 38  
Tahun : 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

1	Meningkatnya kompetensi Indeks Profesionalitas dan iklim kerja aparatur. ASN	Skor/ Indeks	89,95	89,96	89,97	89,99	90,00	IP ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas pegawai ASN.	
Terdiri dari 4 dimensi : Kualifikasi (bobot 25%) Kompetensi (bobot 40%) Kinerja (bobot 30%) Disiplin (bobot 5%)									
Formulasi perhitungan :									
$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$									
$\begin{aligned} IP_1 &= W_{1j} \cdot R_{1j} \\ IP_2 &= W_{2k} \cdot R_{2k} \\ IP_3 &= W_{3l} \cdot R_{3l} \\ IP_4 &= W_{4m} \cdot R_{4m} \end{aligned}$									
2	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik	Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Skor/ Indeks	78,00	81,00	86,00	90,00	93,00	Indikator untuk mengukur tingkat kepuasan ASN Pemprov. DKI Jakarta terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan.
Formulasi Perhitungan : Rata-rata nilai dari survei (sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat).									



NIP. 195903151985032005

**Lampiran 2 :**  
**Dokumen Perjanjian Kinerja**  
**Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIA QIBTYA  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D  
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

MARIA QIBTYA  
NIP 196507191985032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Maria Qibtya  
 NIP : 198507191985032002  
 Jabatan : Kepala Badan  
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
1	Sasaran Strategis Meningkatnya Profesionalitas ASN pada Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin	1	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</li> <li>Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</li> </ol> <p>Definisi:                      Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p> <p>Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN sesuai kewenangan BKD mencakup 3 dimensi dengan metode pembobotan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensi kualifikasi (25%);</li> <li>Dimensi Kinerja (30%);</li> <li>Dimensi disiplin (5%).</li> </ul> <p>Metode Pengukuran:                      Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN).</p> <p>Sumber Data:                      SIMPEG dan SAPK</p>	N/A	N/A	N/A	54	54	Nilai

2	Meningkatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	1	Indeks Sistem Merit	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;</li> <li>2. Peraturan Kepala Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.</li> </ol> <p>Definisi:</p> <p>Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>Penilaian mandiri terhadap 8 aspek sistem merit dengan pembobotan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kebutuhan (10%);</li> <li>2. Pengadaan (10%);</li> <li>3. Pengembangan karir (30%);</li> <li>4. Promosi dan Mutasi (10%);</li> <li>5. Manajemen Kinerja (20%);</li> <li>6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%);</li> <li>7. Perlindungan dan Pelayaran (4%);</li> <li>8. Sistem Informasi (6%).</li> </ol> <p>Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kategori IV, nilai 325-400, sebutan Sangat Baik</li> <li>(2) Kategori III, nilai 250-324, sebutan Baik</li> <li>(3) Kategori II, nilai 175-249, sebutan Kurang</li> <li>(4) Kategori I, nilai 100-174, sebutan Buruk</li> </ol> <p>Sumber Data:</p> <p>Aplikasi SIPINTER KASN</p>	N/A	N/A	N/A	326	326	Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi:</p> <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran <math>\geq 80\%</math>. Apabila serapan anggaran di bawah 40% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = <math>(\text{Persentase Serapan Anggaran} \times 40\%)</math>. Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</li> <li>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</li> <li>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</li> </ol> <p>Metode Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math> dan output 100%</li> <li>Realisasi = <math>(40\% + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%)) + (50\%)</math></li> <li>2. Serapan Anggaran <math>&lt; 80\%</math> dan output <math>\leq 100\%</math></li> <li>Realisasi = <math>(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)</math></li> <li>3. Serapan Anggaran <math>\geq 80\%</math>, namun output <math>\leq 100\%</math></li> <li>Realisasi = <math>(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)</math></li> </ol> <p>Sumber Data:</p> <p>Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen

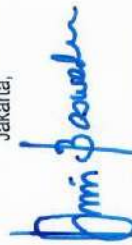
4	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Jakarta Public Policy Center (JPPC) Nomor (64)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Jakarta Public Policy Center (JPPC) Nomor (64)	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta Nomor (68)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta Nomor (68)	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%	100%	100%	Persentase
		1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	100%	100%	N/A	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	Persentase
4		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) Nomor (60)	100%	100%	100%	100%	Persentase
		5	Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga non ASN Nomor (62)	100%	100%	N/A	100%	Persentase

8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase	
<b>Sasaran Khusus</b>												
9	Terwujudnya pengelolaan assessment center yang berbasis web	1	Persentase penyelesaian pengembangan sistem Computer Assisted Test (CAT) berbasis web	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Definisi : Progress penyelesaian pengembangan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang akan dimigrasi dari flash menjadi html (web based).</p> <p>Metode Pengukuran : 25% : Persiapan pengembangan sistem CAT berbasis web (identifikasi kebutuhan) 50% : Persentase pengembangan sistem CAT berbasis web (pembuatan sistem CAT/programming) 100% : Persentase pengembangan sistem CAT berbasis web (Finalisasi dan uji coba sistem CAT)</p> <p>Sumber data : Laporan kegiatan</p>	N/A	25%	50%	100%	100%	Persen	
10	Terinternalisasinya nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku	1	Persentase tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.</p> <p>Definisi : Mengukur tingkat pemahaman ASN terhadap nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara. Survey dilakukan secara online dengan total responden sebanyak 5000 Pegawai.</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah total nilai hasil survei dibagi total responden yang mengisi survei.</p> <p>Sumber data : Laporan hasil pengolahan survei</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persen	
11	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p>Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat	

12	Meningkatkan Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p><b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order</p> <p><b>Sumber Data :</b> Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)</p> <p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun editorial plan lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu &lt;6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p><b>Penghitungan:</b> a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu &lt;6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun editorial plan lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu &lt;6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p><b>Penghitungan:</b> a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu &lt;6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	e-Kinerja	<p>Nilai predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	AA (91)	A (91)	Predikat	
15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	<p><b>Defenisi :</b> Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p><b>Formula Pengukuran:</b> Nilai PMPRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut: AA = &gt;90-100; A = &gt;80-90; BB = &gt;70-80; B = &gt;60-70; CC = &gt;50-60; C = &gt;30-50; D = 0-30</p> <p><b>Sumber Data :</b> Lembar Kerja Evaluasi PMPRB</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai

16	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e-office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E-office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	100%	Persentase
<b>Sasaran Operasional</b>												
18	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
20	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 6 Februari 2022  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Cibhya  
NIP 196507191985032002

**Lampiran 3 :**  
**Dokumen Rencana Aksi**  
**Perjanjian Kinerja Kepala BKD**  
**Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022**

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan			Output		Keterangan	
	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran				Target	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Target		
1 Meningkatkan Profesionalitas ASN	2 Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi)	3 TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :- 54	4 Terdapatnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	5 Indeks Sistem Merit	6 TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :- 326	7 Program Kepegawaian Daerah	8 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9 Penyusunan, Pengembangan dan Pengisian Formasi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	10 Jumlah dokumen Formasi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang tersusun	11 1	12 Dokumen	13 TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :-	14
										4500	Jabatan Pelaksanaan	TW I :- 3027 TW II :- 250 TW III :- 250 TW IV :- 973	
										360	Nota Usul	TW I :- TW II :- 350 TW III :- TW IV :-	
										5000	Nota Usul	TW I :- TW II :- 5000 TW III :- TW IV :-	
										3800	SK	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :-	
										3000	Orang	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :-	
										5000	SK	TW I :- TW II :- TW III :- 5000 TW IV :-	
										3000	SK	TW I :- 500 TW II :- 600 TW III :- 700 TW IV :-	
										1000	Pegawai	TW I :- 250 TW II :- 250 TW III :- 250 TW IV :- 250	
										1	Laporan	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :- 1	
										1	Laporan	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :- 1	
										2	Aplikasi	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :- 1	
										8000	Data	TW I :- TW II :- 2000 TW III :- 2500 TW IV :-	
										10000	Arsip	TW I :- TW II :- 2500 TW III :- 3000 TW IV :-	
										100	ASN	TW I :- 15 TW II :- 25 TW III :- 30 TW IV :- 30	

Tujuan	Sasaran Strategis				Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan			Keterangan		
	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran				Target	Output				
									Volume	Satuan		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Jumlah peserta seleksi mutasi ASN dan luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	200	Peserta	TW I : 40 TW II : 40 TW III : 50 TW IV : 70	
							Supervisi/Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)		Jumlah praja IPDN yang dibina	90	Praja IPDN	TW I : 90 TW II : - TW III : - TW IV : -	
							Pelaksanaan Ujian Dinas: Ujian Kenal-an Pangkat Penyesuaian Ljazah, Ujian Kenal-an Pangkat Penyesuaian Pendidikan PNS		Jumlah Lulusan IPDN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	20	IPDN	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 20	
							Pelaksanaan Ujian Dinas: Ujian Kenal-an Pangkat Penyesuaian Ljazah, Ujian Kenal-an Pangkat Penyesuaian Pendidikan PNS		Jumlah serikat kelulusan Ujian Dinas, Ujian Ljazah dan Ujian Kenal-an Pangkat Penyesuaian Pendidikan yang diterbitkan tepat waktu	1000	Serikat	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : -	
							Proses Kenal-an Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta		Jumlah SK Kenal-an Pangkat yang diterbitkan tepat waktu	5000	SK	TW I : - TW II : 2500 TW III : - TW IV : -	
							Seleksi Terbuka Jabatan		Jumlah level Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu yang diisi melalui mekanisme seleksi terbuka	1	Level Jabatan Pimpinan	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : -	
							Pelaksanaan Sidang Bapenas dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural		Jumlah PNS yang dilantik dalam Jabatan Struktural sesuai persyaratan jabatan	400	PNS	TW I : - TW II : 200 TW III : - TW IV : 200	
							Pengelolaan dan Pengembangan Talent Management		Jumlah Rancangan Peraturan Subemur tentang Pola Karir yang tersusun	1	Rancangan Peraturan	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : -	
							Peningkatan Kapasitas Intermalisasi Budaya Kerja		Jumlah Data Hasil Pemetaan Kompetensi dan Kinerja (Talent Mapping) yang terupdate	200	Data	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 200	
							Pengelolaan Assessment Pegawai		Jumlah agen perubahan yang mengikuti sharing forum	60	Agen Perubahan	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 60	
							Pengelolaan Assessment Pegawai		Jumlah nama jabatan yang memiliki kamus kompetensi	500	Name Jabatan	TW I : - TW II : 25 TW III : 50 TW IV : 425	
							Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Feedback/Konseling Kerja	1050	Pegawa	TW I : - TW II : 200 TW III : 350 TW IV : 500	
							Pengembangan Alat ukur Psikologi		Jumlah alat ukur psikologi yang dikembangkan	2	Alat Ukur	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 2	
							Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1425	Pegawai	TW I : - TW II : 200 TW III : 400 TW IV : 825	
							Peningkatan Pemahaman Konseling Dasar Bagi Pengelola Kepegawaian		Jumlah pengelola kepegawaian SKPD/UKPD yang mengikuti peningkatan pemahaman konseling dasar	120	Pengelola Kepegawaian	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 120	
							Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kompetensi dan kualifikasi	800	JFT	TW I : 200 TW II : 200 TW III : 200 TW IV : 200	

Tujuan		Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan			Output		Keterangan
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran				Target	Volume	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu (JFT) yang dilakukan pembinaan	8	Jenis JFT	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2	
							Penyusunan Kebijakan Pengabdian dan Pengembangan Penilaian dan Evaluasi Manajemen Kinerja Terintegrasi Kinerja Aparatur		Jumlah rekomendasi hasil kajian pengabdian dan pengembangan manajemen kinerja ASN yang ditindaklanjuti	1	Rekomendasi	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1	
							Pengabdian Pemberian Penghargaan Sabyelenana Karya Sabya dan Masa Kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Jumlah pegawai yang mendapatkan Penghargaan Sabyelenana Karya Sabya	1750	Pegawai	TW I : - TW II : - TW III : 875 TW IV : 875	
							Pengabdian Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Jumlah pegawai yang mendapatkan Penghargaan Masa Kerja	1750	Pegawai	TW I : - TW II : 875 TW III : - TW IV : 875	
							Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti seleksi Aparatur Berprestasi	50	Pegawai	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 50	
							Pengabdian Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan sebagai Aparatur Berprestasi	5	Pegawai	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 5	
							Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai	400	Pegawai	TW I : 100 TW II : 100 TW III : 100 TW IV : 100	
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	100	%	TW I : 100 TW II : 100 TW III : 100 TW IV : 100	
							Penyenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta		Jumlah kajian kebijakan kesejahteraan yang tersusun	1	Kajian	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1	
							Penyenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta		Nilai kepuasan terhadap Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta		Nilai kepuasan terhadap penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta		Nilai kepuasan terhadap penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : - TW III : 4 TW IV : -	
							Penyenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta		Nilai kepuasan terhadap penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : - TW II : 4 TW III : - TW IV : 4	
							Penyenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Peribadatan Keagamaan		Nilai kepuasan terhadap Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyenggaraan Wawasan Keagamaan		Nilai kepuasan terhadap Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta		Nilai kepuasan terhadap Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : - TW II : 4 TW III : 4 TW IV : -	

Tujuan		Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan			Output		Keterangan
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	TARGET	Sasaran	Indikator Kinerja				Volume	Satuan	TARGET			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Nilai kepuasan terhadap penyelenggaraan Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :-4 TW IV :-		
							Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur	Nilai kepuasan terhadap Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur	4	Nilai	TW I :-4 TW II :-4 TW III :-4 TW IV :-4		
							Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga & kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Nilai kepuasan terhadap penyelenggaraan Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga & kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :-4 TW IV :-4		
							Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Nilai kepuasan terhadap penyelenggaraan Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :-4		
							Revitalisasi Kelembagaan Yayasan di bawah koordinasi Set DP KORPRI	Jumlah dokumen Kajian Revitalisasi Kelembagaan Yayasan di bawah koordinasi Set DP KORPRI	1	Dokumen	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :-1		
							Pemberian Karangan Bunga bagi Anggota KORPRI yang Wafat	Nilai kepuasan terhadap penyelenggaraan Pemberian Karangan Bunga bagi Anggota KORPRI yang Wafat	4	Nilai	TW I :-4 TW II :-4 TW III :-4 TW IV :-4		
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah SK Pensiun di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diterbitkan tepat waktu	120	SK	TW I :-30 TW II :-30 TW III :-30 TW IV :-30		
							Pembekalan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembekalan	500	Pegawai	TW I :- TW II :- TW III :- TW IV :-500		
							Pengelolaan Promosi ASN	Persentase usulan sidang sidang baperjab Kota Administrasi Jakarta Pusat pengembalian sumpah/pelantikan	100	%	TW I :-100 TW II :-100 TW III :-100 TW IV :-100		
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah SK Pensiun di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara yang diterbitkan tepat waktu	156	SK	TW I :-39 TW II :-39 TW III :-39 TW IV :-39		
							Pembekalan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembekalan	400	Pegawai	TW I :- TW II :-200 TW III :-200 TW IV :-		
							Pengelolaan Promosi ASN	Persentase usulan sidang sidang baperjab Kota Administrasi Jakarta Utara pengembalian sumpah/pelantikan	100	%	TW I :-100 TW II :-100 TW III :-100 TW IV :-100		
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah SK Pensiun di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat yang diterbitkan tepat waktu	200	SK	TW I :-50 TW II :-50 TW III :-50 TW IV :-50		
							Pembekalan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembekalan	600	Pegawai	TW I :- TW II :-300 TW III :- TW IV :-300		
							Pengelolaan Promosi ASN	Persentase usulan sidang sidang baperjab Kota Administrasi Jakarta Barat pengembalian sumpah/pelantikan	100	%	TW I :-100 TW II :-100 TW III :-100 TW IV :-100		
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah SK Pensiun di Lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diterbitkan tepat waktu	150	SK	TW I :-40 TW II :-40 TW III :-40 TW IV :-30		



Tujuan	Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan			Keterangan			
	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran				Indikator Kinerja	Output					
								Volume	Satuan		Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Nilai Kepuasa terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi BKD	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus BKD	Nilai kepuasa terhadap layanan pemeliharaan KDO/KDO Khusus BKD	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perengkapan kerja	Nilai kepuasa terhadap Pemeliharaan peralatan dan perengkapan kerja BKD	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perengkapan Kebersihan Kantor BKD	Nilai Kepuasa terhadap Layanan Penyediaan Perengkapan Kebersihan Kantor BKD	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Nilai Kepuasa Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Nilai kepuasa Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyedia Peralatan dan perengkapan kantor Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Nilai Kepuasa Terhadap Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan peralatan rumah tangga DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Nilai Kepuasa Terhadap Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai kepuasa Terhadap Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyediaan Jasa Surat Mengurut	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO yang kebutuhan BEM nya terpenuhi	6	Unit	TW I : 6 TW II : - TW III : - TW IV : -	
							Penyediaan Jasa Surat Mengurut	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyalur/Caraka	Jumlah Laporan Kinerja Febugas Jasa Surat Menyura/Caraka tepat waktu	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3	
							Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	Nilai Kepuasa Terhadap Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Sekretariat DP Korpri	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Nilai kepuasa terhadap penyediaan jasa pajak dan perizinan KDO/KDO Khusus KORPRI	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Nilai kepuasa terhadap layanan pemeliharaan KDO/KDO Khusus KORPRI	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perengkapan kerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Nilai kepuasa terhadap Pemeliharaan peralatan dan perengkapan kerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	

Tujuan		Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan		Output		Keterangan	
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	TARGET	Sasaran	Indikator Kinerja				Volume	Satuan	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan dan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jasa Administrasi Keuangan	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jasa Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi dan Perengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dan Perengkapan Kerja dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan dan Perengkapan Kerja	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perengkapan Kebersihan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Perengkapan Kebersihan Kantor Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pemahaman terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Pemahaman terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	340	Pegawai		TW I : 85 TW II : 85 TW III : 85 TW IV : 85	
						Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jasa Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi dan Perengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perengkapan kerja	Nilai kepuasan terhadap layanan pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan Kerja	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perengkapan Kebersihan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Perengkapan Kebersihan Kantor Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	4	Nilai	Nilai	TW I : 4 TW II : 4 TW III : 4 TW IV : 4	



Tujuan	Tujuan		Sasaran Strategis		Program	Sub Kegiatan	RSK	Kegiatan		Output			Keterangan
	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran				Target	Volume	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
						<p>Palaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyediaan Makanan dan Minuman</p> <p>Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>Jasa Administrasi dan Keuangan</p> <p>Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Makanan dan Minuman</p> <p>Sewa Mesin Fotokopi</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja</p> <p>Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor</p>	<p>Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</p> <p>Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman</p> <p>Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi</p> <p>Nilai Kepuasan terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja</p> <p>Nilai Kepuasan terhadap Layanan Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>800</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Pegawai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p> <p>Nilai</p>	<p>TW I : 4</p> <p>TW II : 4</p> <p>TW III : 4</p> <p>TW IV : 4</p> <p>TW I : 4</p> <p>TW II : 4</p> <p>TW III : 4</p> <p>TW IV : 4</p> <p>TW I : 4</p> <p>TW II : 4</p> <p>TW III : 4</p> <p>TW IV : 4</p> <p>TW I : 4</p> <p>TW II : 4</p> <p>TW III : 4</p> <p>TW IV : 4</p> <p>TW I : 4</p> <p>TW II : 4</p> <p>TW III : 4</p> <p>TW IV : 4</p>		

Jakarta, 28 Februari 2022  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibliya  
NIP. 1965071985032002

**Lampiran 4 :**  
**Data Rekapitulasi Capaian**  
**Indikator Kinerja Persentase**  
**Kualitas Pelaksanaan Anggaran**  
**Tahun 2022**

**REALISASI INDIKATOR PRESENTASE PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022**

NO PD/UKPD	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTPUT	SERAPAN			EFISIENSI		PENGUKURAN	KETERANGAN
				PAGU ANGGARAN (APBDB)	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI	SISA PAGU	% ERSIENSI		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	589.805.573.492	586.466.284.606	99,43%	3.339.288.886	0,57%	90,28%	Definisi : Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada sub kegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu: a. <b>Penyerapan Anggaran</b> Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran > 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Presentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. <b>Efisiensi</b> adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. <b>Pencapaian output</b> adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi emonev Anggaran hasil inputan PD/UKPD <b>Metode Pengukuran:</b> 1. Serapan Anggaran ≥ 80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi) x 10%/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran < 80% dan output < 100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran x 40%) + (pencapaian output x 50%) 3. Serapan Anggaran ≥ 80%, namun output < 100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			589.805.573.492	586.466.284.606	99,43%	3.339.288.886	0,57%	90,28%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	17.820.000	16.200.000	90,91%	1.620.000	9,09%	94,55%	
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			17.820.000	16.200.000	90,91%	1.620.000	9,09%	94,55%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2.647.151.204	2.556.315.450	96,57%	90.835.754	3,43%	91,72%	
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			2.647.151.204	2.556.315.450	96,57%	90.835.754	3,43%	91,72%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	243.217.595	199.908.225	82,19%	43.309.370	17,81%	98,90%	
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			243.217.595	199.908.225	82,19%	43.309.370	17,81%	98,90%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	100%	50.732.000	50.732.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			50.732.000	50.732.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	62.856.800	62.146.200	98,87%	710.600	1,13%	90,57%	
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			62.856.800	62.146.200	98,87%	710.600	1,13%	90,57%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	183.600.000	182.900.000	99,62%	700.000	0,38%	90,19%	
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			183.600.000	182.900.000	99,62%	700.000	0,38%	90,19%	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	113.905.281	112.033.000	98,36%	1.872.281	1,64%	90,82%	
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			113.905.281	112.033.000	98,36%	1.872.281	1,64%	90,82%	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	171.699.000	171.698.379	100,00%	621	0,00%	90,00%	
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			171.699.000	171.698.379	100,00%	621	0,00%	90,00%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	86.204.270	83.431.698	96,78%	2.772.572	3,22%	91,61%	
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			86.204.270	83.431.698	96,78%	2.772.572	3,22%	91,61%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99.459.492	98.922.090	99,46%	537.402	0,54%	90,27%	
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			99.459.492	98.922.090	99,46%	537.402	0,54%	90,27%	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	58.461.645	54.750.750	93,65%	3.710.895	6,35%	93,17%	
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			58.461.645	54.750.750	93,65%	3.710.895	6,35%	93,17%	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	550.000	500.000	90,91%	50.000	9,09%	94,55%	
13	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			550.000	500.000	90,91%	50.000	9,09%	94,55%	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	167.243.521	164.275.843	98,23%	2.967.678	1,77%	90,89%	
14	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			167.243.521	164.275.843	98,23%	2.967.678	1,77%	90,89%	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	98.300.290	95.906.775	97,57%	2.393.515	2,43%	91,22%	
15	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			98.300.290	95.906.775	97,57%	2.393.515	2,43%	91,22%	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	8.640.000	8.640.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
16	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			8.640.000	8.640.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	68.200.000	68.200.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
17	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			68.200.000	68.200.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	37.461.600	37.461.276	100,00%	324	0,00%	90,00%	
18	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			37.461.600	37.461.276	100,00%	324	0,00%	90,00%	
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	8.378.810	8.327.886	99,39%	50.924	0,61%	90,30%	
19	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			8.378.810	8.327.886	99,39%	50.924	0,61%	90,30%	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	7.130.838	7.130.838	100,00%	0	0,00%	90,00%	
20	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			7.130.838	7.130.838	100,00%	0	0,00%	90,00%	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	880.000	800.000	90,91%	80.000	9,09%	94,55%	
21	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			880.000	800.000	90,91%	80.000	9,09%	94,55%	
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	126.506.743	115.787.325	91,53%	10.719.418	8,47%	94,24%	
22	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			126.506.743	115.787.325	91,53%	10.719.418	8,47%	94,24%	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	94.159.670	92.518.500	98,25%	1.641.170	1,74%	90,87%	
23	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			94.159.670	92.518.500	98,25%	1.641.170	1,74%	90,87%	
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	14.400.000	14.400.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
24	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			14.400.000	14.400.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	49.800.000	49.800.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
25	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			49.800.000	49.800.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	37.461.600	37.212.000	99,33%	249.600	0,67%	90,33%	
26	ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			37.461.600	37.212.000	99,33%	249.600	0,67%	90,33%	

NO PD/UKPD	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTPUT	SERAPAN			EFISIENSI			PENGUKURAN	KETERANGAN
				PAGU ANGGARAN (APBDP)	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI	SISA PAGU	% EFISIENSI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	5.953.850	5.860.800	98,44%	93.060	1,56%	90,78%	
28	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	3.616.580	3.218.000	88,98%	398.580	11,02%	95,51%	
29	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
30	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	288.863.218	282.119.060	97,67%	6.744.158	2,33%	91,17%	
31	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	8.481.517	8.409.360	99,15%	72.157	0,85%	90,43%	
32	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	30.691.650	30.193.000	98,38%	498.650	1,62%	90,81%	
33	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Bahan/Material	100%	21.859.506	21.859.506	100,00%	0	0,00%	90,00%	
34	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	64.658.230	64.542.500	99,82%	115.730	0,18%	90,09%	
35	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	510.336.592	503.537.098	98,67%	6.799.494	1,33%	90,67%	
36	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	224.769.600	199.350.000	88,69%	25.419.600	11,31%	95,65%	
37	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	84.669.308	81.713.642	96,51%	2.955.666	3,49%	91,75%	
38	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	84.266.831	83.989.260	99,67%	277.571	0,33%	90,16%	
39	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	500.000	500.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
40	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	89.461.677	87.014.765	97,26%	2.446.912	2,74%	91,37%	
41	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	94.145.568	91.475.100	97,16%	2.670.468	2,84%	91,42%	
42	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	8.280.000	8.280.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
43	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	11.304.000	11.304.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
44	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	37.461.600	37.128.000	99,11%	333.600	0,89%	90,45%	
45	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	8.463.180	8.458.200	99,94%	4.980	0,06%	90,03%	
46	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	182.977.826	181.448.260	99,16%	1.529.566	0,84%	90,42%	
47	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	22.602.404	22.507.470	99,58%	94.934	0,42%	90,21%	
48	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	9.000.000	9.000.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
49	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	38.100.000	38.100.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	
50	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	37.461.600	37.450.680	99,97%	10.920	0,03%	90,01%	
51	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	10.801.494	10.767.000	99,68%	34.494	0,32%	90,16%	
52	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	5.038.968	4.977.240	98,77%	61.728	1,23%	90,61%	
53	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	300.000	300.000	100,00%	0	0,00%	90,00%	

NO	PD/UKPD	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTPUT	SERAPAN			EFISIENSI			PENGUKURAN	KETERANGAN
					PAGU ANGGARAN (APBDP)	REALISASI KEUANGAN	% REALISASI	SISA PAGU	% EFISIENSI	7		
1	54	2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 100%	6 66.130.123	7 63.517.190	8 93,23%	9 4.612.933	10 6,77%	11 93,39%	12	
55		3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 100%	6 99.188.848	7 96.533.370	8 97,32%	9 2.655.478	10 2,68%	11 91,34%		
56		3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 100%	6 14.164.000	7 14.164.000	8 100,00%	9 0	10 0,00%	11 90,00%		
57		3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 100%	6 44.600.000	7 44.600.000	8 100,00%	9 0	10 0,00%	11 90,00%		
58		3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 100%	6 34.339.800	7 34.339.800	8 100,00%	9 0	10 0,00%	11 90,00%		
59		3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4 Pemeliharaan Peralatan dan Mestri Lainnya	5 100%	6 5.509.042	7 5.372.400	8 97,52%	9 136.642	10 2,48%	11 91,24%		
60		3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 100%	6 3.504.248	7 3.470.970	8 99,05%	9 33.278	10 0,95%	11 90,47%		
RATA - RATA CAPAIAN PRESENTASE PELAKSANAAN ANGGARAN											91,12%	
TARGET PERJANJIAN KINERJA											91,00%	
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA											100,13%	

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Myria Citra  
NIP. 196607191985032002

**Lampiran 5 :**  
**Data Rekapitulasi Capaian**  
**Kegiatan Strategis Daerah (KSD)**  
**BKD Tahun 2022**

**DATA REKAPITULASI CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH ( KSD)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022**

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1		3	4	5	6	7	8	9
<b>ASISTEN PEMERINTAHAN</b>								
1	KSD 39	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	<p>Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022)</p> <p>Penetapan Dokumen Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026</p> <p>Penyusunan Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023)</p> <p>Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW IV 2021</p>	<p>Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022)</p> <p>Ditetapkannya Dokumen Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>Terlaksananya penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026</p> <p>Tersusunnya Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023)</p> <p>Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW IV 2021</p>	<p>Tersusunnya Rancangan Dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022)</p> <p>Ditetapkannya Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026</p> <p>Tersusunnya Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023)</p> <p>1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2021 (selesai di akhir Januari 2022)</p> <p>2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2021 (selesai di akhir Januari 2022)</p>	<p>B03</p> <p>B03</p> <p>B03</p> <p>B09</p> <p>B03</p>	<p>1. Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (eselon 2)</p> <p>2. Rancangan Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan 4 (dituangkan dalam bentuk cascading kinerja)</p> <p>3. Laporan pegawai yang telah menginput SKP Tahun 2022</p> <p>Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah (target selesai bulan Januari)</p> <p>Rancangan Renstra Tahun 2023-2026</p> <p>1. Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (eselon 2, 3 dan 4)</p> <p>2. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023</p> <p>selesai Bulan Agustus</p> <p>1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2021</p> <p>2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2021</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1		3	4	5	6	7	8	9
			Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I 2022	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I 2022	1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2022 (selesai di April 2022) 2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2022 (selesai di akhir April 2022)	B06	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2022	100%
			Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW II 2022	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW II 2022	1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2022 (selesai di Juli 2022) 2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2022 (selesai di akhir Juli 2022)	B09	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2022	100%
			Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW III 2022	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW III 2022	1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2022 (selesai di Oktober 2022) 2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2022 (selesai di akhir Oktober 2022)	B12	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2022	100%
			Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	1. Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 2. Teriniputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 pada website esr.menpan.go.id (akhir Januari 2022)	B03	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id (akhir Januari 2022)	100%
2	KSD 60	Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management	Evaluasi Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV Terkait Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM	Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV Terkait Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM sebagai bahan masukan bagi pimpinan	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV Terkait Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM pada TW I kepada Gubernur	B03	Tersampainya Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV Terkait Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM pada TW I kepada Gubernur	100%
						B06	Tersampainya Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV Terkait Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM pada TW II kepada Gubernur	100%
						B09	Tersampainya Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV Terkait Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM pada TW III kepada Gubernur	100%
						B12	Tersampainya Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV Terkait Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM pada TW IV kepada Gubernur	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1			4	5	6	7	8	9
3	KSD 61	Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan administrator Tersusunnya surat usulan penetapan kepada Kementerian PAN dan RB	Terlaksananya revidi kamus kompetensi teknis jabatan administrator hasil revidi sesuai dengan OTK baru dan penyetaraan jabatan struktural Tersusunnya surat usulan penetapan kepada Kementerian PAN dan RB	B09 B09	100% kamus kompetensi teknis jabatan administrator yang telah direvisi sesuai dengan OTK baru dan penyetaraan jabatan struktural Surat usulan penetapan standar kompetensi teknis jabatan administrator kepada Kementerian PAN dan RB	100% 100%
				Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang standar kompetensi teknis jabatan administrator	Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang standar kompetensi teknis jabatan administrator	B12	Rancangan Keputusan Gubernur tentang standar kompetensi teknis jabatan administrator	100%
			Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	B06	25 % kamus kompetensi teknis jabatan pengawas yang tersusun	100%
				Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	B09	50 % kamus kompetensi teknis jabatan pengawas yang tersusun	100%
				Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	B12	100 % kamus kompetensi teknis jabatan pengawas yang tersusun	100%
			Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	Tersusunnya standar kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	B12	Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	100%
			Kebijakan Pola Pengembangan Karir PNS	Tersusunnya Keputusan Gubernur mengenai Pola Karir PNS	Pola karier dan peta jabatan	B09	Kepub Kebijakan Pola Pengembangan Karier yang memuat antara lain: 1. Bentuk Pola Pengembangan Karier PNS 2. Peta Jalur Karier PNS	100%
			Penetapan Kebijakan Manajemen Talenta	Terlaksananya penetapan Kebijakan Manajemen Talenta	Ditetapkannya Pergub Manajemen Talenta	B06	Pergub Manajemen Talenta	100%
			Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta	Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta	Terimplementasinya Kebijakan Manajemen Talenta	B09	Laporan hasil implementasi Kebijakan Manajemen Talenta yang memuat antara lain : 1. Kondisi Eksisting Pemetaan PNS pada Talent Pool berdasarkan Kompetensi dan Kinerja 2. Updating Data Manajemen Talenta 3. Rencana Tindak Lanjut Manajemen Talenta	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1		3	4	5	6	7	8	9
			Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Badan Kepegawaian Daerah atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2022	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022. Target Capaian 90%	B06	Berita acara hasil verifikasi Inspektorat. Catatan: Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%	100%
			Penyusunan TOR dan Roadmap pengembangan sistem Talent Pool	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022. Target Capaian 95%	B12	Berita acara hasil verifikasi Inspektorat. Catatan: Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%	100%
			Pelaksanaan Uji Coba Sistem Talent Pool	Tersedianya TOR dan Roadmap pengembangan sistem Talent Pool	Tersusunnya TOR dan Roadmap pengembangan sistem Talent Pool	B03	TOR dan Roadmap pengembangan sistem Talent Pool	100%
			Pengembangan Sistem Talent Pool	Terlaksananya Uji Coba Sistem Talent Pool	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba Sistem Talent Pool	B03	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba Sistem Talent Pool	100%
			Penyusunan Perubahan Pergub Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Talent Pool	Pelaksanaan Pengembangan Sistem Talent Pool	B09	Hasil Pengembangan Sistem Talent Pool Target Bulan Juli	100%
4	KSD 62	Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN	Penyusunan Perubahan Pergub Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)	Tersusunnya rancangan Perubahan Pergub Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)	Tersampainya Rancangan Perubahan Pergub Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) ke Kemendagri	B06	Rancangan Perubahan Pergub Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) telah disampaikan ke Kemendagri (Target selesai Bulan April)	100%
			Penyelesaian kajian peta kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Unskilled	Terselesaikannya kajian peta kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Unskilled	Tersampainya hasil kajian peta kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Unskilled ke Biro ORB	B03	Hasil kajian peta kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Unskilled ke Biro ORB (target selesai bulan Februari)	100%
			Kajian Standar Biaya Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) (Unskilled)	Terselesaikannya Kajian Standar Biaya Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) (Unskilled) untuk dikirim ke BPKD	Tersampainya Kajian Standar Biaya Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) (Unskilled) ke BPKD	B03	Hasil Kajian Standar Biaya Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) (Unskilled) ke BPKD	100%
			Pengembangan sistem e-PJLP	Terlaksananya pengembangan sistem e-PJLP	Terinupnya substansi perubahan regulasi PJLP ke dalam sistem e-PJLP	B12	Laporan hasil pengimputan substansi perubahan regulasi PJLP ke dalam sistem e-PJLP (target selesai bulan Oktober 2021)	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Monitoring dan evaluasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi PJLP	B12	Laporan monitoring dan evaluasi PJLP yang memuat antara lain: 1. Gambaran kondisi ekisting PJLP Tahun 2022 2. Tindak Lanjut evaluasi pengelolaan PJLP untuk tahun 2023	100%
5	KSD 63	Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik ) Tahun 2022	Evaluasi SPBE pada Badan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya pengumpulan data isian form evaluasi SPBE Perangkat Daerah	Tersampainya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KEMENPAN RB kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	B09	Surat penyampaian dan lampiran data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE lingkup Perangkat Daerah sesuai format KEMENPAN RB kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%
6	KSD 64	Jakarta Public Policy Center (JPPC)	Pemutakhiran Database Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya bimbingan teknis Pemutakhiran Database Pengembangan Kompetensi melalui SAPK	Terlaksananya bimbingan teknis Pemutakhiran Database Pengembangan Kompetensi melalui SAPK	B06	Laporan bimbingan teknis Pemutakhiran Database Pengembangan Kompetensi melalui SAPK	100%
7	KSD 66	Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan	Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan verifikasi terhadap aktivitas kerja para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (kecuali Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten) oleh Walikota/Bupati	Dilaksanakannya tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan verifikasi terhadap aktivitas kerja para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (kecuali Inspektur Pembantu Walikota/Bupati)	Terselesainya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan verifikasi terhadap aktivitas kerja para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (kecuali Inspektur Pembantu Walikota/Bupati)	B03	Dilaksanakannya review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan verifikasi terhadap aktivitas kerja para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (kecuali Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten) oleh Walikota/Bupati pada Tahun 2021	100%
						B06	Dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan verifikasi terhadap aktivitas kerja para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (kecuali Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten) oleh Walikota/Bupati pada Tahun 2022	100%
						B12	Dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan verifikasi terhadap aktivitas kerja para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (kecuali Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten) oleh Walikota/Bupati pada Tahun 2022	100%
8	KSD 68	Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta	Penyusunan Keputusan Gubernur tentang tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	Ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	B03	Keputusan Gubernur tentang tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	100%
			Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	Ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja	B06	Keputusan Gubernur tentang Road Map Budaya Kerja (Target selesai Bulan April)	90%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Evaluasi Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	Terlaksananya Survey Hasil Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	Tersusunnya Laporan Hasil Survey Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	B03	Laporan Hasil Survey ke-1 Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja yang memuat antara lain: 1. Cakupan Responden 2. Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap Nilai-nilai Budaya Kerja 3. Efektivitas Sosialisasi Pergub 54/2020	100%
			Penetapan agen perubahan budaya kerja	Terlaksananya Survey Hasil Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	Tersusunnya Laporan Hasil Survey Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja	B09	Laporan Hasil Survey ke-2 Internalisasi dan Pengimplementasian Nilai-Nilai Budaya Kerja yang memuat antara lain: 1. Cakupan Responden 2. Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap Nilai-nilai Budaya Kerja 3. Efektivitas Sosialisasi Pergub 54/2020 4. Efektivitas Peran Agen Perubahan di Perangkat Daerah	100%
			Pelaksanaan Program kerja agen perubahan	Terlaksananya Program kerja agen perubahan	Disampaikannya Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan agen perubahan budaya kerja kepada Gubernur	B09	Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan agen perubahan budaya kerja untuk 41 Perangkat Daerah dan 10 Biro Setda (Target selesai Bulan Agustus)	100%
			Pelaksanaan forum agen perubahan	Terlaksananya Program kerja agen perubahan	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Program kerja agen perubahan	B06	Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kerja Agen Perubahan Semester I kepada Sekda melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, disertai dengan pemeringkatan	100%
			Pelaksanaan forum agen perubahan	Terlaksananya knowledge sharing dalam sharing forum bagi agen perubahan	Terlaksananya sharing forum bagi agen perubahan	B12	Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kerja Agen Perubahan Semester II kepada Sekda melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, disertai dengan pemeringkatan	100%
				Terlaksananya forum agen perubahan	Terlaksananya sharing forum bagi agen perubahan	B12	Laporan pelaksanaan sharing forum agen perubahan yang memuat antara lain: 1. Progres implementasi nilai-nilai Budaya Kerja 2. Rancangan Program Kerja Agen Perubahan Tahun 2023	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1			4	5	6	7	8	9
<b>ASISTEN KESEJAHTERAAN</b>								
9	KSD 5	Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan	Pemediaan kebutuhan SDM di SMK yang menerapkan PPK-BLUD	Terpenuhinya kebutuhan SDM di SMK yang menerapkan PPK-BLUD	Tersedianya Bendahara dan pengurus barang di SMK yang menerapkan PPK-BLUD	B03	Tersedianya persyaratan dan kompetensi untuk SDM di SMK PPK BLUD (bendahara dan Pengurus Barang) dari SDM Eksternal yang kompeten	100%
						B06	Tersedianya SDM di SMK PPK BLUD (bendahara dan Pengurus Barang) dari SDM Eksternal yang kompeten	100%
						B09	Laporan Pelaksanaan dari SDM PPK BLUD	100%
						B12	Rencana Pelaksanaan PPK BLUD di tahun selanjutnya.	100%
10	KSD 12	Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif	Terlaksananya peragangan setiap hari dan olahraga minimal 1 kali/minggu bagi seluruh pegawai	Terlaksananya peragangan setiap hari dan olahraga minimal 1 kali/minggu bagi seluruh pegawai	100% OPD di tingkat Provinsi melaksanakan peragangan setiap hari dan olahraga minimal 1 kali/minggu bagi seluruh pegawai	B03	1. Tersedianya kebijakan tertulis mengenai himbauan peragangan setiap hari dan olahraga minimal 1 kali/minggu bagi pegawai (bulan Februari 2022)	100%
						B03	2. Tersosialisasikannya kebijakan tertulis mengenai himbauan peragangan setiap hari dan olahraga minimal 1 kali/minggu bagi pegawai (bulan Februari 2022)	100%
						B03	3. Terlaporkannya kegiatan peragangan dan olahraga melalui media sosial masing-masing OPD dengan menyertakan #AksiGermas #AksiGermasDKI serta mention akun IG @dinkesdki dan @bkddkijakarta minimal 1 kali/bulan (bulan Maret 2022)	100%
						B06	Terlaporkannya kegiatan peragangan dan olahraga melalui media sosial masing-masing OPD dengan menyertakan #AksiGermas #AksiGermasDKI serta mention akun IG @dinkesdki dan @bkddkijakarta minimal 1 kali/bulan	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1			4	5	6	7	8	9
						B09	Terlaporkannya kegiatan pererangan dan olahraga melalui media sosial masing-masing OPD dengan menyertakan #AksiGermas #AksiGermasDKI serta mention akun IG @dinkesdki dan @bkddkijakarta minimal 1 kali/bulan	100%
						B12	Terlaporkannya kegiatan pererangan dan olahraga melalui media sosial masing-masing OPD dengan menyertakan #AksiGermas #AksiGermasDKI serta mention akun IG @dinkesdki dan @bkddkijakarta minimal 1 kali/bulan	100%
11	KSD 13	Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Aparatus Sipil Negara	Tersosialisasikannya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Aparatur Sipil Negara	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sosialisasi sebanyak 51 Perangkat Daerah	B03	1. Tersusunnya jadwal pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait (DPPAPP berkoordinasi dengan BKD) 2. Terbitnya SE Kepala BKD terkait pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Perangkat Daerah jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan dengan tema 2022 3. BKD bersama dengan DPPAPP melakukan sosialisasi kepada pengelola kepegawaian Perangkat Daerah jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%
						B06	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait	100%
						B09	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7 B12	8 1. Tersusunnya laporan tahunan penyelenggaraan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Survei internal ASN yang mengukur pemahaman ASN terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (materi survey disiapkan oleh DPPAPP)	9 100%

Jakarta, 31 Januari 2023  
Kepala Batan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya  
NIP. 1965071985032002

**Lampiran 6 :**  
**Dokumen Penghargaan dan**  
**Prestasi BKD Provinsi DKI**  
**Jakarta Tahun 2022**



**B. Penerapan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan kualitas “BAIK”.**



Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Adapun aspek penilaiannya mencakup lima dimensi, yaitu : a) dimensi persiapan pengisian JPT; b) dimensi pelaksanaan pengisian JPT; c) dimensi pelaporan pengisian JPT; d) dimensi inovasi manajemen pengisian JPT; dan e) dimensi pelanggaran sistem merit dalam jabatan.

### C. BKN AWARD 2022.



Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional kembali memberikan penghargaan bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah melalui BKN Award. Penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN. Adapun penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam BKN Award 2022 yaitu (1) kategori Penilaian Kompetensi Pemerintah Provinsi Tipe Besar dan (2) Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT

## D. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberikan Anugerah Kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai **Badan Publik Terbaik II** dalam ajang **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik** untuk Kategori Badan dalam Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

**E. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Predikat “AA”.**



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada BKD Provinsi DKI Jakarta atas keberhasilannya menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Predikat “AA”.